

**Pengaruh Literasi Digital, Akses Keuangan, dan Pembangunan Manusia terhadap  
Kinerja Ekonomi Sektoral Provinsi di Indonesia**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Sherly Natasya  
Nomor Mahasiswa : 20313131  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2026**

Pengaruh Literasi Digital, Akses Keuangan, dan Pembangunan Manusia terhadap Kinerja  
Ekonomi Sektoral Provinsi di Indonesia

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Sherly Natasya  
Nomor Mahasiswa : 20313131  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2026**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARTISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh- sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperi dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2026

Penulis,



Sherly Natasya

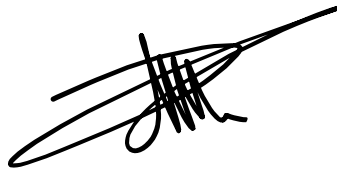
## **PENGESAHAN**

### **Pengaruh Literasi Digital, Akses Keuangan, dan Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Ekonomi Sektoral Provinsi di Indonesia**

Nama : Sherly Natasya  
Nomor Mahasiswa : 20313131  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 13 Februari 2026

Telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,



Jannahar Saddam Ash Shidiqie SEL., MEK.

## **BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR**

## **MOTTO**

"Hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dalam perjalanan itu. Saya meyakini bahwa konsistensi, doa, dan semangat untuk terus belajar adalah kunci untuk menghadapi setiap tantangan dan meraih tujuan."

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* rabbi 'alamin, beribu kata syukur terucap atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, atas segala berkah dan kemudahan yang mengiringi perjalanan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya serta sebagai tanda perjuangan saya dalam menggapai cita-cita yang mulia. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan selama masa perkuliahan sehingga semua kemudahan dan kelancaran terus menyertai perjalanan kuliah saya sampai saat ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya dan teman-teman dekat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya baik dalam keadaan suka maupun duka.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, tiada kata terindah yang bisa penulis sampaikan kecuali ucapan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayahNya. Shalawat teriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk bagi umat manusia dari jaman jahiliyah menuju ke jalan yang penuh peradaban seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Literasi Digital, Akses Keuangan, dan Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Ekonomi Sektoral Provinsi di Indonesia”**.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang memberikan doa dari awal hingga terselesainya tugas skripsi ini. Dalam hal ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara saya yang tak henti-hentinya selalu mendukung dan mendoakan atas kemudahan dan kelancaran semua proses penyusunan skripsi ini, serta dengan setia selalu mendengar keluh kesah penulis dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan.
2. Bapak Jannahar Saddam Ash Shidiqie SEI., MEK. selaku dosen pembimbing skripsi, yang selama masa bimbingan sudah meluangkan baik waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Bapak Abdul Hakim., S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang dengan sabar telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, khususnya Ibu Mustika Noor Mifrahi SEI., MEK., Bapak Aminuddin Anwar S.E., M.Sc., dan Ibu Riska Dwi Astuti, S.Pd., M.Sc.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARTISME.....	III
PENGESAHAN.....	IV
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR.....	V
MOTTO.....	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XV
ABSTRAK.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	15
2.1. Kajian Pustaka.....	15
2.2. Landasan Teori.....	19
2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	19
2.2.2. Literasi Digital.....	20
2.2.3. Literasi Ekonomi.....	22
2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	23
2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	25
2.2.6. Upah Minimum Provinsi (UMP).....	27
2.3. Kerangka Pemikiran.....	29
2.4. Hubungan Variabel.....	30

2.4.1.	Hubungan Literasi Digital terhadap Pendapatan UMKM.....	30
2.4.2.	Hubungan Literasi Ekonomi terhadap Pendapatan UMKM.....	31
2.4.3.	Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pendapatan UMKM.....	31
2.4.4.	Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pendapatan UMKM.....	32
2.4.5.	Hubungan Upah Minimum Provinsi terhadap Pendapatan UMKM.....	33
2.5.	Hipotesis Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1.	Jenis Penelitian.....	35
3.2.	Definisi Operasional Variabel.....	35
3.2.1.	Variabel Independen.....	35
3.2.2.	Variabel Dependen.....	39
3.3.	Metode Analisis.....	39
3.3.1.	Estimasi Regresi Data Panel.....	40
3.3.2.	Motode Common Effect.....	40
3.3.3.	Model Fixed Effect.....	41
3.3.4.	Model Random Effect.....	41
3.4.	Pemilihan Model Regresi.....	42
3.4.1.	Uji Chow.....	42
3.4.2.	Uji Hausman.....	43
3.4.3.	Uji Lagrange Multiplier (LM).....	44
3.5.	Uji Statistika.....	45
3.5.1.	Uji Kelayakan Model (Uji F).....	45
3.5.2.	Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t).....	47
3.6.	Koefsisen Determinasi ( $R^2$ ).....	48
3.7.	Cross Section Effect.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1.	Deskripsi dan Penelitian.....	50
4.2.	Pemilihan Model Regresi.....	53
4.2.1.	Chow Test.....	53

4.2.2.	Hausman Test .....	54
4.3.	Model Terbaik .....	55
4.3.1.	Model Random Effect .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.2.	Uji Simultan (Uji F) .....	56
4.3.3.	Uji Parsial (Uji t) .....	56
4.3.4.	Interpretasi Hasil .....	57
4.4.	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	59
4.5.	Pembahasan .....	59
4.5.1.	Pengaruh Literasi Digital terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral) .....	59
4.5.2.	Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral) .....	60
4.5.3.	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).....	61
4.5.4.	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).....	62
4.5.5.	Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).....	63
BAB V PENUTUP .....		65
5.1.	Kesimpulan .....	65
5.2.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69
LAMPIRAN .....		72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pdrb Sektor Usaha Tahun 2022-2024 .....	2
Gambar 1. 2 Literasi Digital Provinsi Di Indonesia Tahun 2022-2024 .....	4
Gambar 1. 3 Literasi Ekonomi Provinsi Di Indonesia Tahun 2022-2024 .....	6
Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Di Indonesia Tahun 2022-2024.....	8
Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Di Indonesia Tahun 2022-2024.....	9
Gambar 1. 6 Upah Minimum Provinsi Di Indoneia Tahun 2022-2024.....	11
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka .....	15
Tabel 4. 1 Statistika Deskriptif.....	51
Tabel 4. 2 Hasil Chow Test.....	54
Tabel 4. 3 Hasil Hausman Test .....	54
Tabel 4. 4 Fixed Effect Model.....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

lampiran I. Data Penelitian.....	72
Lampiran II. Hasil Uji Chow Test .....	77
Lampiran III. Hasil Uji Hausman Test .....	78
Lampiran IV. Hasil Uji Fixed Effect Model.....	79
Lampiran V. Statistika Deskriptif .....	80

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi digital, literasi ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kinerja ekonomi sektoral yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor usaha. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Dalam penelitian ini, data time series mencakup periode 2022–2024, sementara data cross section meliputi data hanya 2022-2024 karena keterbatasan ketersediaan data Literasi digital mulai ada 2022 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha. Literasi ekonomi yang diproksikan melalui kredit atau pembiayaan UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor usaha, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan belum sepenuhnya mendorong peningkatan kinerja ekonomi sektoral. Variabel IPM tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor usaha, yang menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja ke sektor usaha. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha.

Kata kunci: Literasi Digital, Literasi Ekonomi, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, PDRB Sektor Usaha, Data Panel.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks perekonomian nasional, capaian pembangunan ekonomi tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (Badan Pusat Statistik, 2024). Struktur PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan kontribusi masing-masing sektor dalam membentuk total output daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap sektor-sektor usaha dalam struktur PDRB menjadi penting untuk memahami dinamika perekonomian nasional dan regional.

Secara regional, kontribusi sektoral terhadap PDRB memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagaimana dijelaskan dalam model pertumbuhan Solow (Solow, 1956). Dalam konteks ekonomi daerah, peningkatan kinerja sektor usaha akan tercermin dalam kenaikan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga (Mankiw, 2019). Dengan demikian, PDRB sektoral menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana suatu wilayah mampu meningkatkan kapasitas produksinya secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, terdapat variasi yang signifikan dalam struktur dan kinerja sektoral antarprovinsi di Indonesia. Perbedaan karakteristik sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, tingkat adopsi teknologi, serta kebijakan ekonomi daerah menyebabkan kontribusi sektoral terhadap PDRB tidak bersifat homogen di seluruh wilayah (Todaro & Smith, 2015). Ketimpangan antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural yang berbeda di setiap

provinsi. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai determinan PDRB sektoral antar Provinsi menjadi relevan untuk memahami variasi kinerja ekonomi regional di Indonesia.



sumber: BPS, 2024 (diolah)

**Gambar 1. 1 PDRB Sektor Usaha tahun 2022-2024**

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat adanya disparitas yang cukup signifikan antarprovinsi di Indonesia dalam hal PDRB sektoral. Provinsi-provinsi dengan tingkat aktivitas ekonomi tinggi, khususnya di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, menunjukkan nilai PDRB sektoral yang jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kondisi ini mencerminkan tingginya konsentrasi kegiatan produksi, perdagangan, industri, serta jasa yang berkontribusi besar terhadap pembentukan nilai tambah regional (BPS, 2024). Dominasi sektor-sektor produktif di wilayah tersebut memperlihatkan struktur ekonomi yang relatif lebih maju dan terdiversifikasi.

Sebaliknya, beberapa provinsi di kawasan Indonesia bagian timur seperti Maluku, Maluku Utara, serta provinsi-provinsi di wilayah Papua menunjukkan nilai PDRB sektoral yang relatif lebih rendah. Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketimpangan kapasitas produksi antarwilayah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, serta kondisi pasar tenaga kerja (Todaro & Smith, 2015). Disparitas tersebut menunjukkan

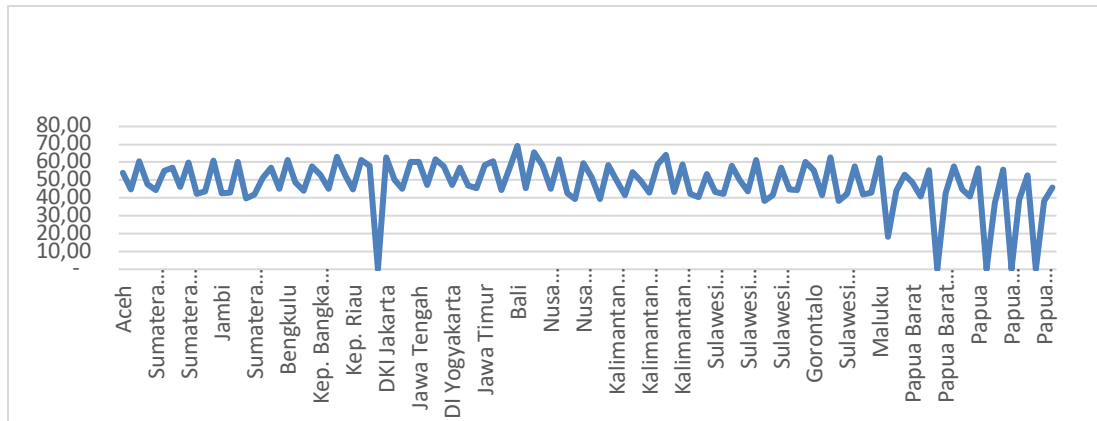
bahwa kinerja ekonomi sektoral antarprovinsi belum merata dan masih dipengaruhi oleh karakteristik pembangunan daerah masing-masing.

Variasi nilai PDRB sektoral antarprovinsi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi regional tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya alam semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi dan sosial. Tingkat literasi digital, literasi ekonomi, kualitas pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, serta kebijakan upah minimum merupakan variabel-variabel yang secara teoritis dapat memengaruhi produktivitas dan nilai tambah sektoral di suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris berbasis data panel antarprovinsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam memengaruhi PDRB sektoral di Indonesia.

Memasuki era transformasi digital, perekonomian Indonesia mengalami perubahan struktural yang ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Digitalisasi berperan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor-sektor ekonomi melalui otomatisasi proses produksi, optimalisasi rantai pasok, serta perluasan akses pasar berbasis platform digital (OECD, 2021). Dalam perspektif makroekonomi, peningkatan adopsi teknologi digital berkontribusi terhadap kenaikan output sektoral karena mampu menurunkan biaya transaksi, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan kapasitas produksi agregat. Dengan demikian, tingkat literasi digital masyarakat menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kinerja PDRB sektoral suatu wilayah.

Sebagai upaya untuk mengukur kesiapan digital antarwilayah, pemerintah mengembangkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), yang mencerminkan tingkat literasi dan pemanfaatan teknologi digital di berbagai provinsi (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023). Disparitas nilai IMDI antarprovinsi menunjukkan bahwa kapasitas adopsi teknologi tidak merata, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat produktivitas dan efisiensi sektoral. Wilayah dengan tingkat literasi digital yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat

meningkatkan nilai tambah sektoral dan mendorong pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.



Sumber: IMDI, 2024 (diolah)

**Gambar 1. 2 Literasi Digital Provinsi di Indonesia tahun 2022-2024**

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat adanya variasi tingkat literasi digital antarprovinsi yang cukup signifikan. Sebagian besar provinsi berada pada kisaran nilai menengah, yang menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi-provinsi dengan tingkat pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang relatif lebih maju cenderung memiliki tingkat literasi digital yang lebih tinggi, sementara beberapa provinsi di kawasan Indonesia bagian timur masih menunjukkan nilai literasi digital yang relatif lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan digital antarwilayah yang berpotensi memengaruhi dinamika aktivitas ekonomi sektoral.

Dalam perspektif makroekonomi, perbedaan tingkat literasi digital antarprovinsi dapat memengaruhi kinerja PDRB sektoral melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Wilayah dengan tingkat literasi digital yang lebih tinggi cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi dalam proses produksi, distribusi, dan manajemen usaha, sehingga mampu menekan biaya transaksi, meningkatkan akses pasar, serta mempercepat arus

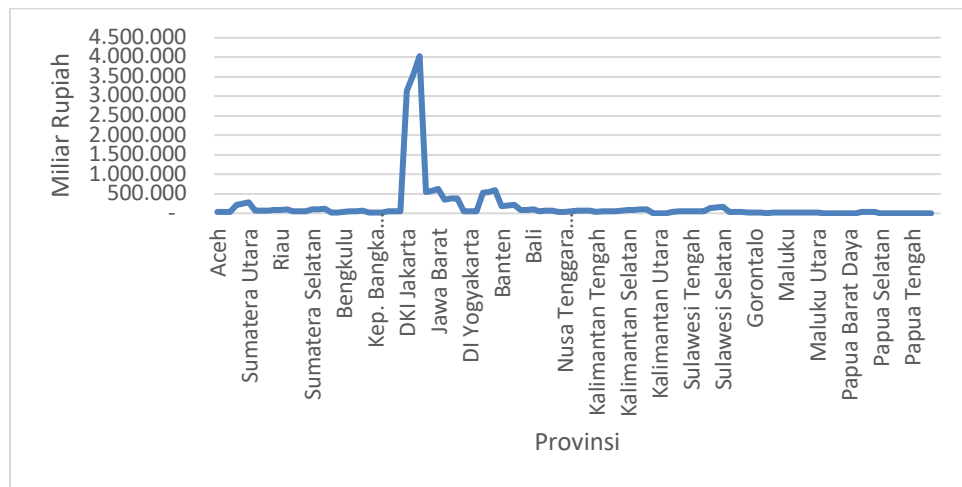
informasi ekonomi. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat membatasi optimalisasi pemanfaatan teknologi, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya nilai tambah sektoral. Oleh karena itu, variasi literasi digital antarprovinsi menjadi faktor yang relevan untuk dianalisis dalam menjelaskan perbedaan kinerja PDRB sektoral di Indonesia.

Selain literasi digital, literasi ekonomi dan inklusi keuangan merupakan faktor struktural yang berperan dalam memengaruhi kinerja ekonomi sektoral. Literasi ekonomi mencerminkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep ekonomi dasar seperti pengambilan keputusan rasional, pengelolaan sumber daya, investasi, serta mekanisme pasar. Dalam perspektif makroekonomi, tingkat literasi ekonomi yang lebih baik memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya yang lebih efisien, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektoral (Mankiw, 2019). Sebaliknya, rendahnya literasi ekonomi dapat menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan ekonomi yang pada akhirnya menghambat efisiensi dan pertumbuhan output regional (Lusardi & Mitchell, 2014).

Dalam penelitian ini, literasi ekonomi diproksikan melalui indikator akses terhadap kredit atau pembiayaan sebagai bagian dari mekanisme intermediasi keuangan. Secara struktural, sistem keuangan berperan sebagai intermediary yang menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit untuk kegiatan investasi dan produksi (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006). Peningkatan akses pembiayaan di suatu wilayah mencerminkan berjalannya fungsi intermediasi keuangan yang efektif, yang dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas investasi sektoral, serta memperkuat efisiensi ekonomi. Dengan demikian, variasi tingkat akses kredit antarprovinsi berpotensi memengaruhi kinerja PDRB sektoral melalui peningkatan produktivitas dan akumulasi modal.

Selain itu, inklusi keuangan yang lebih luas memungkinkan pelaku ekonomi di berbagai sektor memperoleh dukungan pendanaan untuk ekspansi usaha, modernisasi teknologi, serta peningkatan kualitas faktor produksi. Dalam konteks regional, peningkatan pembiayaan yang tersalurkan ke sektor-sektor produktif akan berdampak pada kenaikan output riil yang tercermin dalam PDRB atas dasar harga konstan (Bank Indonesia, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Oleh karena itu, literasi ekonomi dan

intermediasi keuangan menjadi variabel penting yang secara teoritis dapat menjelaskan perbedaan kinerja PDRB sektoral antarprovinsi melalui mekanisme produktivitas, efisiensi, dan akumulasi modal.



Sumber: OJK, 2024 (diolah)

### Gambar 1. 3 Literasi Ekonomi Provinsi di Indonesia tahun 2022-2024

Grafik 1.3 yang diprosikan melalui jumlah kredit atau pembiayaan menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok antarprovinsi di Indonesia selama periode 2022–2024. DKI Jakarta tampak mendominasi dengan nilai kredit yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, mencerminkan tingginya aktivitas intermediasi keuangan dan kedalaman sektor keuangan di wilayah tersebut. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten juga menunjukkan tingkat penyaluran kredit yang relatif lebih besar dibandingkan sebagian besar wilayah luar Jawa, meskipun masih berada di bawah DKI Jakarta. Sebaliknya, beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia seperti Maluku dan wilayah Papua menunjukkan nilai kredit yang relatif lebih rendah, yang mengindikasikan keterbatasan akses dan distribusi pembiayaan formal.

Dalam perspektif makroekonomi, perbedaan tingkat penyaluran kredit antarprovinsi mencerminkan variasi efektivitas fungsi intermediasi keuangan dalam

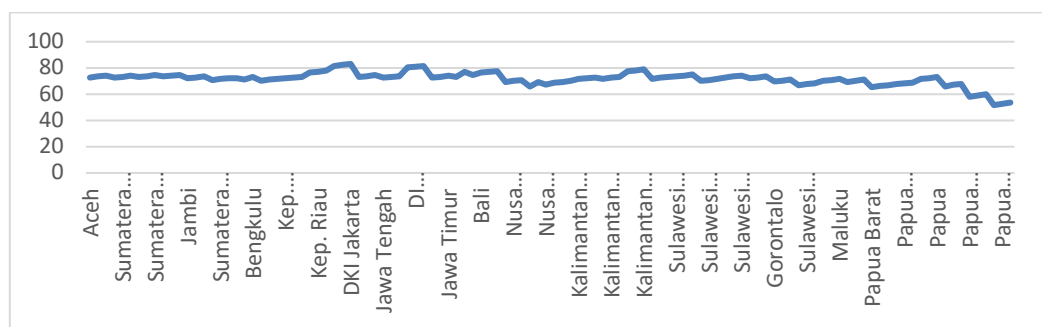
mendukung aktivitas produksi dan investasi sektoral. Wilayah dengan tingkat kredit yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas pembiayaan yang lebih besar untuk mendorong ekspansi usaha, modernisasi teknologi, serta akumulasi modal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan output sektoral. Sebaliknya, keterbatasan akses pembiayaan dapat membatasi ekspansi produksi dan menahan pertumbuhan nilai tambah sektoral. Oleh karena itu, variasi distribusi kredit antarprovinsi menjadi faktor yang relevan dalam menjelaskan perbedaan kinerja PDRB sektoral selama periode pengamatan.

Faktor kualitas sumber daya manusia secara makro tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur capaian pembangunan melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (BPS, 2024; UNDP, 2023). IPM yang lebih tinggi menunjukkan kualitas tenaga kerja yang lebih baik, baik dari sisi kompetensi, kesehatan, maupun kapasitas adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Dalam perspektif teori pertumbuhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bentuk akumulasi modal manusia (human capital) yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi faktor produksi (Todaro & Smith, 2015).

Dalam konteks ekonomi regional, variasi IPM antarprovinsi dapat memengaruhi kinerja PDRB sektoral melalui mekanisme peningkatan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja. Tenaga kerja yang lebih terdidik dan sehat cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengoperasikan teknologi, mengadopsi inovasi, serta meningkatkan kualitas output sektoral. Peningkatan kualitas tenaga kerja juga memperkuat daya saing sektor-sektor produktif dan mendorong ekspansi output riil yang tercermin dalam PDRB atas dasar harga konstan. Oleh karena itu, perbedaan tingkat IPM antarprovinsi menjadi variabel yang relevan dalam menjelaskan variasi kinerja PDRB sektoral secara struktural dan makroekonomi.

Selain itu, peningkatan IPM juga berkontribusi terhadap efisiensi ekonomi secara agregat melalui perbaikan kualitas institusi dan kapasitas inovasi daerah. Pendidikan yang lebih tinggi mendorong kemampuan analitis dan manajerial tenaga kerja, sementara kesehatan yang baik meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan menurunkan tingkat

absensi akibat penyakit. Kombinasi kedua aspek tersebut memperkuat daya dukung sektor-sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Dengan demikian, provinsi dengan tingkat IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan teknologi maupun dinamika pasar, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan kinerja PDRB sektoral secara berkelanjutan.

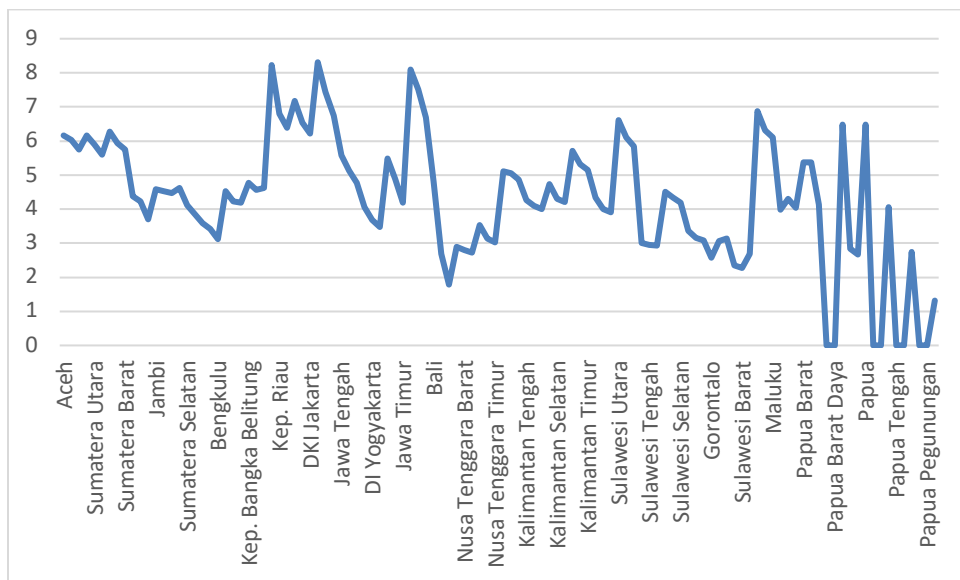


Sumber: BPS, 2024 (diolah)

#### Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia tahun 2022-2024

Berdasarkan Gambar 1.4, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi di Indonesia tahun 2022–2024 menunjukkan adanya disparitas yang cukup jelas antarwilayah. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan wilayah perkotaan utama seperti DKI Jakarta memiliki nilai IPM yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebagian provinsi di kawasan timur Indonesia, khususnya wilayah Papua dan sekitarnya. Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan capaian pembangunan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sebagaimana diukur oleh BPS (2024). Dalam perspektif ekonomi regional, variasi IPM tersebut berpotensi memengaruhi kinerja PDRB sektoral melalui mekanisme kualitas tenaga kerja dan produktivitas, di mana provinsi dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi yang lebih baik, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah sektoral yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan IPM yang relatif rendah.

Kondisi pasar tenaga kerja juga merupakan faktor struktural yang memengaruhi kinerja ekonomi sektoral. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam kegiatan produksi, sehingga menjadi indikator efisiensi pemanfaatan tenaga kerja dalam perekonomian (BPS, 2024). Secara makroekonomi, TPT yang tinggi menunjukkan adanya underutilization sumber daya manusia, yang berpotensi menurunkan kapasitas produksi agregat dan menghambat pertumbuhan output sektoral. Sebaliknya, penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan partisipasi tenaga kerja dalam proses produksi, yang dapat mendorong kenaikan produktivitas dan nilai tambah sektoral (Mankiw, 2021). Dengan demikian, variasi TPT antarprovinsi berpotensi memengaruhi kinerja PDRB sektoral melalui mekanisme kualitas tenaga kerja dan efisiensi pasar tenaga kerja dalam mengalokasikan faktor produksi secara optimal.



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

**Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia tahun 2022-2024**

Grafik 1.5 menunjukkan adanya variasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup signifikan antarprovinsi selama periode 2022–2024. Provinsi dengan aktivitas ekonomi dan tingkat urbanisasi tinggi seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Banten

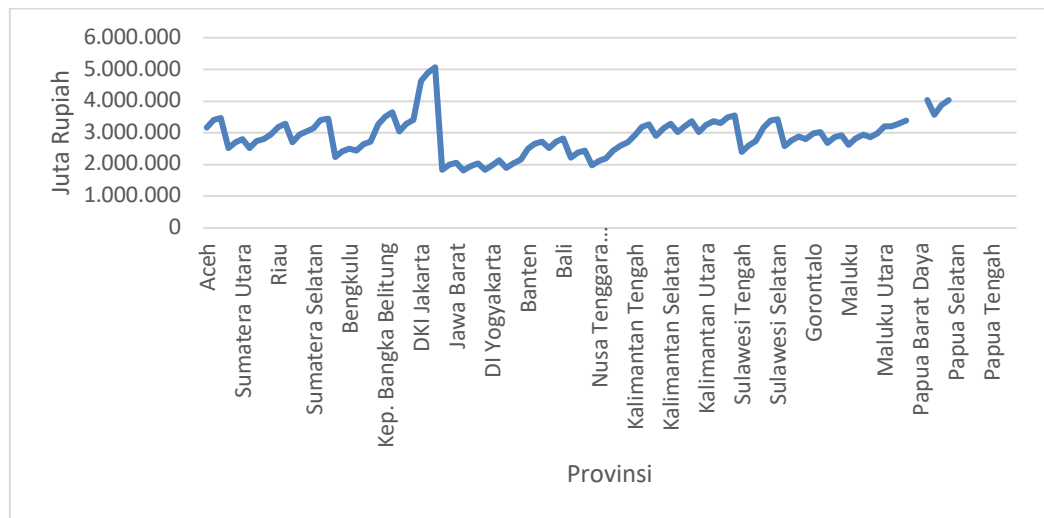
cenderung memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi lainnya. Kondisi ini mencerminkan tingginya arus migrasi tenaga kerja serta ketatnya persaingan di pasar kerja perkotaan. Sebaliknya, beberapa provinsi di kawasan Indonesia Timur, seperti Papua dan Papua Pegunungan, memperlihatkan tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah, meskipun angka tersebut tidak selalu mencerminkan tingginya produktivitas tenaga kerja, melainkan dapat dipengaruhi oleh dominasi sektor informal dan karakteristik struktur ekonomi daerah.

Secara makroekonomi, variasi TPT antarprovinsi tersebut berimplikasi pada perbedaan tingkat pemanfaatan tenaga kerja dalam proses produksi sektoral. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, yang dapat mengurangi kapasitas produksi dan menekan pertumbuhan nilai tambah sektoral. Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja yang lebih baik berpotensi meningkatkan output riil dan mendorong pertumbuhan PDRB sektoral. Fluktuasi TPT selama periode 2022–2024 juga mengindikasikan bahwa proses pemulihan dan konsolidasi ekonomi pascapandemi belum berlangsung merata di seluruh wilayah, sehingga kondisi pasar tenaga kerja tetap menjadi faktor struktural yang relevan dalam menjelaskan variasi kinerja PDRB sektoral antarprovinsi.

Selain itu, kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, khususnya Upah Minimum Provinsi (UMP), turut memengaruhi dinamika output ekonomi sektoral. Penetapan UMP bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja dan menjaga standar hidup layak, namun secara makroekonomi kebijakan ini juga berdampak pada struktur biaya produksi di berbagai sektor usaha (Borjas, 2020). Kenaikan UMP dapat meningkatkan biaya tenaga kerja yang berpotensi memengaruhi efisiensi produksi, terutama pada sektor-sektor yang padat karya. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kenaikan biaya tenaga kerja dapat menekan margin usaha dan memperlambat pertumbuhan output sektoral.

Di sisi lain, peningkatan UMP juga dapat mendorong kenaikan daya beli masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan permintaan agregat terhadap barang dan jasa. Peningkatan permintaan tersebut berpotensi mendorong ekspansi produksi dan

kenaikan nilai tambah sektoral, yang pada akhirnya tercermin dalam pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Oleh karena itu, pengaruh UMP terhadap PDRB sektoral bersifat dual effect, yakni melalui mekanisme biaya produksi dan permintaan agregat, sehingga perlu dianalisis secara empiris untuk mengetahui arah dan signifikansi pengaruhnya pada tingkat provinsi (Kementerian Ketenagakerjaan, 2023).



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

### Gambar 1. 6 Upah Minimum Provinsi di Indoneia tahun 2022-2024

Berdasarkan Gambar 1.6, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia tahun 2022–2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarprovinsi. DKI Jakarta tercatat memiliki UMP tertinggi dibandingkan provinsi lain, diikuti oleh beberapa provinsi dengan tingkat industrialisasi dan aktivitas ekonomi tinggi seperti Kepulauan Riau dan Papua. Sebaliknya, sejumlah provinsi di wilayah dengan struktur ekonomi yang relatif berbasis pertanian atau sektor primer menunjukkan tingkat UMP yang lebih rendah. Perbedaan UMP antarprovinsi ini mencerminkan variasi struktur biaya tenaga kerja, tingkat produktivitas regional, serta kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah. Dalam konteks ekonomi regional, variasi UMP tersebut berpotensi memengaruhi kinerja PDRB sektoral melalui mekanisme biaya produksi dan daya beli masyarakat, di mana kenaikan upah dapat meningkatkan konsumsi agregat sekaligus

memengaruhi efisiensi biaya pada sektor-sektor padat karya, sehingga berdampak pada dinamika output sektoral antarprovinsi selama periode 2022–2024.

Berdasarkan pengamatan awal terhadap data panel tahun 2022–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), serta publikasi resmi terkait inklusi keuangan dan ketenagakerjaan, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antarprovinsi dalam hal PDRB sektoral, tingkat literasi digital, akses pembiayaan, IPM, TPT, dan UMP. Perbedaan tersebut mencerminkan heterogenitas struktur ekonomi dan tingkat pembangunan antarwilayah di Indonesia. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor pertumbuhan ekonomi secara parsial, masih relatif terbatas studi berbasis data panel antarprovinsi yang secara simultan menguji pengaruh digitalisasi, intermediasi keuangan, pembangunan manusia, dan pasar tenaga kerja terhadap kinerja ekonomi sektoral dalam satu kerangka empiris terpadu.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menganalisis determinan pertumbuhan ekonomi secara agregat nasional atau hanya berfokus pada satu atau dua variabel independen secara terpisah. Padahal, dalam konteks ekonomi regional, kinerja PDRB sektoral dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural yang saling berinteraksi, seperti tingkat adopsi teknologi digital, efektivitas intermediasi keuangan, kualitas tenaga kerja, serta kebijakan upah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan faktor-faktor struktural tersebut ke dalam satu model data panel provinsi periode 2022–2024 untuk menganalisis determinan PDRB sektoral. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai variasi kinerja ekonomi regional serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi ekonomi pembangunan dan ekonomi regional di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia?
3. Apakah pembangunan manusia berpengaruh terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia?
4. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia?
5. Apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia?
6. Apakah digitalisasi, inklusi keuangan, pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia periode 2022–2024

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh pembangunan manusia terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia.

6. Menganalisis pengaruh digitalisasi, inklusi keuangan, pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi secara simultan terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia periode 2022–2024.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, khususnya terkait analisis determinan kinerja ekonomi sektoral berbasis data panel antarprovinsi. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan faktor digitalisasi, inklusi keuangan, pembangunan manusia, dan pasar tenaga kerja dalam satu model empiris regional.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis peningkatan digitalisasi, perluasan inklusi keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan pasar tenaga kerja yang lebih efisien guna mendorong pertumbuhan PDRB sektoral yang berkelanjutan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu. Kesamaan variabel dependen dan independen, tujuan penelitian, teknik analisis, dan temuan penelitian yang akan digunakan sebagai referensi penelitian sebelumnya menjadi bahan pertimbangan dalam memilih penelitian terdahulu.

**Tabel 2. 1 Kajian Pustaka**

No	Nama, Tahun, Judul	Temuan	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Rosifa et al. (2024) – Pengaruh Literasi Digital dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM	Literasi keuangan signifikan, literasi digital tidak signifikan terhadap kinerja UMKM	Sama-sama menguji digitalisasi dan literasi/keuangan sebagai determinan ekonomi.	Objek UMKM dan data sektoral mikro.
2	Firmansyah & Dede (2022) – Literasi Ekonomi dan Digital terhadap Kinerja Kewirausahaan	Literasi ekonomi dan digital berpengaruh terhadap inovasi dan kinerja	Sama-sama meneliti peran literasi digital dan ekonomi	Fokus mikro dan inovasi; bukan PDRB sektoral atau data panel provinsi
3	Sahroh (2018) – Literasi Ekonomi dan Media Sosial terhadap Minat Berwirausaha	Literasi ekonomi & media sosial berpengaruh positif	Sama-sama mengaitkan literasi ekonomi dan digital	Fokus perilaku wirausaha mahasiswa, bukan output sektoral
4	Maryatmo & Pamenta (2023) – Faktor Digital terhadap Kinerja UMKM	Kecepatan internet & peran pemerintah memengaruhi kinerja	Sama-sama membahas digitalisasi	Studi mikro UMKM; tidak menggunakan indikator makro regional

5	Paramita (2021) – Digitalisasi Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	Digitalisasi berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja	Sama-sama melihat dampak digitalisasi terhadap aspek makro	Tidak menguji PDRB sektoral secara panel provinsi
6	Tidak menguji PDRB sektoral secara panel provinsi	Marketplace meningkatkan daya saing UMKM	Sama-sama membahas peran digitalisasi	Fokus daya saing UMKM, bukan kinerja ekonomi regional
7	Fokus daya saing UMKM, bukan kinerja ekonomi regional	Digital capital signifikan terhadap pendapatan	Sama-sama menguji ekonomi digital	Objek UMKM dan data sektoral mikro
8	Ulyati et al. (2024) – IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Papua	IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	Sama-sama menguji pembangunan manusia terhadap kinerja ekonomi	Fokus satu provinsi (Papua), bukan panel 38 provinsi dan bukan sektoral
9	Jannah et al. (2025) – IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	IPM berpengaruh positif dan signifikan	Sama-sama meneliti pengaruh IPM terhadap ekonomi	Skala nasional agregat, bukan PDRB sektoral regional
10	Sari & Fisabilillah (2023) – TPT dan Pertumbuhan Ekonomi	TPT berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi	Sama-sama menguji TPT terhadap kinerja ekonomi	Tidak mengintegrasikan digitalisasi & inklusi keuangan dalam satu model
11	Lokiman et al. (2013) – UMP, Investasi dan PDRB	UMP dan investasi berpengaruh terhadap PDRB	Sama-sama menguji UMP terhadap PDRB	Fokus satu kota dan periode lama; tidak menggunakan pendekatan panel provinsi terbaru

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 2.1 menyajikan ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan digitalisasi, inklusi keuangan, pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, serta keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kinerja sektoral. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai dasar teoritis dan empiris dalam menyusun

kerangka pemikiran penelitian ini, khususnya dalam menjelaskan determinan struktural yang memengaruhi kinerja ekonomi regional.

Penelitian Rosifa et al. (2024) menganalisis pengaruh literasi digital dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, sedangkan literasi digital tidak signifikan secara parsial. Meskipun berfokus pada level mikro, penelitian ini memberikan dasar konseptual bahwa kapasitas digital dan finansial memiliki implikasi terhadap kinerja ekonomi, yang dalam penelitian ini diperluas pada level makro melalui PDRB sektoral.

Selanjutnya, penelitian Firmansyah dan Dede (2022) menunjukkan bahwa literasi ekonomi dan literasi digital berpengaruh terhadap inovasi dan kinerja kewirausahaan melalui pendekatan analisis jalur. Hasilnya menegaskan bahwa literasi berperan dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada unit analisis kelompok tani muda, sedangkan penelitian ini mengkaji dampaknya terhadap output ekonomi sektoral antarprovinsi.

Maryatmo dan Pamenta (2023) menemukan bahwa faktor digital seperti kecepatan internet dan peran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja usaha. Temuan ini memperkuat argumen bahwa infrastruktur dan pemanfaatan teknologi digital berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada UMKM kedai kopi, sedangkan penelitian ini menempatkan digitalisasi sebagai determinan struktural terhadap PDRB sektoral.

Rahmadan et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi ekonomi digital melalui digital capital berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha. Hasil ini mengindikasikan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Dalam penelitian ini, konsep tersebut dikembangkan pada konteks regional dengan melihat dampaknya terhadap kinerja ekonomi sektoral provinsi.

Penelitian yang menitikberatkan pada pembangunan manusia ditunjukkan oleh Ulyati et al. (2024) dan Jannah et al. (2025), yang menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mendorong produktivitas dan output ekonomi. Penelitian ini mengadopsi kerangka tersebut dengan menguji pengaruh IPM terhadap PDRB sektoral antarprovinsi.

Sementara itu, Sari dan Fisabilillah (2023) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja memiliki implikasi terhadap kapasitas produksi dan output ekonomi. Penelitian ini memperluas analisis tersebut dengan melihat bagaimana pengangguran memengaruhi kinerja ekonomi sektoral secara regional.

Lokiman et al. (2013) menunjukkan bahwa upah minimum provinsi dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan berdampak pada PDRB. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan memiliki implikasi terhadap struktur biaya, produktivitas, dan output ekonomi. Penelitian ini mengintegrasikan variabel UMP bersama variabel struktural lainnya dalam satu model panel regional.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu masih cenderung terpisah dalam mengkaji faktor digitalisasi, pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan kebijakan upah, serta banyak yang berfokus pada level mikro atau wilayah tertentu dengan pendekatan time series tunggal. Penelitian yang menjadi rujukan utama dalam aspek pembangunan manusia dan output ekonomi adalah Ulyati et al. (2024) serta Jannah et al. (2025), karena secara langsung menguji hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi. Namun, perbedaan utama penelitian ini terletak pada integrasi variabel digitalisasi, inklusi keuangan, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan UMP dalam satu model data panel antarprovinsi periode 2022–2024 dengan fokus pada kinerja ekonomi sektoral (PDRB sektoral). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi empiris yang lebih komprehensif dalam menjelaskan determinan struktural kinerja ekonomi regional di Indonesia.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

(Menurut Sukirno, 1997) dalam (Saputra, 2011) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sementara BPS menyatakan bahwa PDRB berdasarkan harga berlaku berfungsi untuk menggambarkan struktur perekonomian dan peran sektor-sektor ekonomi. PDRB yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengurangi angka kemiskinan. Menghitung PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan antara lain :

1. Pendekatan produksi : pendekatan ini sering disebut pendekatan nilai tambah, menghitung nilai tambah bruto dengan mengurangi biaya antara dari output yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi, dan nilai tambah ini mencerminkan balas jasa faktor produksi dalam proses produksi.
2. Pendekatan pendapatan : pendekatan ini menghitung nilai tambah dari kegiatan ekonomi dengan menjumlahkan semua balas jasa, termasuk upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, serta pajak tak langsung neto. Namun, pada sektor pemerintahan dan usaha non-profit , surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah, dan keuntungan tidak diperhitungkan.
3. Pendekatan pengeluaran : jumlah dari seluruh komponen permintaan akhir meliputi :

$$C + I + G + (X - M)$$

- a. C : *Consumption* adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan.
- b. I : *Investment* adalah pembentukan modal tetap domestik bruto
- c. G : *Government* adalah konsumsi pemerintah berupa barang dan jasa
- d. X – M : Ekspor – Impor adalah ekspor neto dikurangi impor dalam jangka waktu satu tahun.

### 2.2.2. Literasi Digital

Menurut Paul Gilster dalam bukunya *Digital Literacy* (1997), literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk yang berasal dari beragam sumber luas, yang dapat diakses melalui perangkat komputer. Konsep ini menekankan pentingnya keterampilan dalam mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara efektif. Seiring perkembangan teknologi, Bawden (2001) memperkenalkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang tidak hanya berfokus pada kemampuan menggunakan komputer, tetapi juga mencakup literasi informasi, yaitu keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi secara kritis di lingkungan digital. Literasi digital modern kini berkembang menjadi konsep yang lebih luas, mencakup pemahaman terhadap berbagai platform digital, keamanan data, serta etika dalam menggunakan teknologi.

Literasi digital mencakup berbagai keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif. Menurut Steve Wheeler (2012) dalam tulisannya *Digital Literacies for Engagement in Emerging Online Cultures*, terdapat sembilan elemen utama dalam literasi digital. Elemen-elemen tersebut meliputi kemampuan berjejaring sosial (*social networking*), memahami berbagai bentuk literasi dalam media digital (*transliteracy*), menjaga privasi daring (*maintaining privacy*), serta mengelola identitas digital (*managing identity*). Selain itu, literasi digital juga mencakup kemampuan menciptakan konten (*creating content*), mengatur serta membagikan informasi (*organising and sharing content*), mendaur ulang atau memanfaatkan kembali konten (*reusing/repurposing content*), menyaring serta memilih informasi yang relevan (*filtering and selecting content*), serta menyebarluaskan informasi secara mandiri (*self broadcasting*). Keterampilan ini menjadi kunci bagi individu untuk dapat beradaptasi dan berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Jejaring sosial (*Social Networking*) terus berkembang dengan hadirnya berbagai aplikasi yang menawarkan fitur beragam. Dalam memanfaatkan platform ini, diperlukan sikap selektif dan kehati-hatian, mengingat setiap situs jejaring sosial memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penggunaan dan fitur-fitur yang tersedia menjadi hal yang penting agar pengguna dapat memanfaatkan platform tersebut secara optimal. Selain itu, etika dalam berjejaring sosial juga harus diperhatikan untuk menjaga interaksi yang positif dan bertanggung jawab. Literasi digital berperan dalam membimbing individu agar dapat menggunakan jejaring sosial secara bijak dan efektif.

Sementara itu, *transliteracy* merujuk pada kemampuan memanfaatkan berbagai platform digital untuk membuat, mengumpulkan, membagikan, dan mengomunikasikan informasi. Keterampilan ini mencakup pemanfaatan media sosial, grup diskusi, perangkat seluler, serta berbagai layanan online guna menyebarkan informasi secara efisien. Dengan menguasai *transliteracy*, seseorang dapat beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

Mengelola Identitas Digital (*Managing Digital Identity*) berkaitan dengan cara seseorang menggunakan dan menyesuaikan identitasnya dengan tepat di berbagai jaringan sosial dan platform digital. Hal ini penting untuk menjaga keamanan serta membangun reputasi yang baik di dunia maya. Sementara itu, *Creating Content* merujuk pada keterampilan dalam menciptakan berbagai jenis konten digital yang dapat dipublikasikan melalui berbagai aplikasi dan platform online, seperti PowToon, Prezi, blog, forum, dan wikis. Selain itu, keterampilan ini juga mencakup kemampuan memanfaatkan platform *e-learning* guna mendukung pembelajaran dan berbagi informasi secara lebih luas.

*Organising and Sharing Content* mengacu pada kemampuan dalam mengatur serta membagikan informasi agar lebih mudah diakses dan tersebar luas. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan situs social bookmarking, yang

memungkinkan pengguna untuk menyebarluaskan informasi secara lebih efisien sehingga dapat diakses oleh banyak orang di internet. *Reusing/Repurposing Content* merujuk pada kemampuan untuk mengolah kembali berbagai jenis informasi yang telah ada guna menciptakan konten baru yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, seorang guru membuat materi pelajaran dengan *lisensi Creative Commons*, lalu mengunggahnya ke *Slideshare*, sehingga bisa diakses dan diunduh oleh banyak orang. Konten ini kemudian dapat dimodifikasi atau diperbarui dengan tambahan informasi baru agar lebih relevan dan bermanfaat sesuai kebutuhan pengguna lainnya. *Filtering and Selecting Content* adalah kemampuan dalam mencari, menyaring, dan memilih informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan kebutuhan. Proses ini sering dilakukan melalui mesin pencari di internet, di mana pengguna perlu memilah informasi dari berbagai sumber untuk memastikan kredibilitas dan keakuratannya. *Self Broadcasting* bertujuan untuk membagikan ide, gagasan, serta konten multimedia secara mandiri melalui berbagai platform, seperti blog, forum, atau wikis. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam komunitas sosial online, di mana individu dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pandangan mereka kepada audiens yang lebih luas.

### **2.2.3. Literasi Ekonomi**

Literasi ekonomi harus ditanamkan sejak usia dini karena kemampuan ini tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk peran dan keteladanan orang tua. Menurut (Sina, 2012), literasi ekonomi mencakup kemampuan individu dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep ekonomi serta pola pikir ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, (Sina, 2012) menyatakan bahwa literasi ekonomi merupakan keterampilan hidup (*life skill*) yang esensial bagi setiap individu untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, literasi ekonomi memiliki penerapan yang luas, baik dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun

dalam konteks rumah tangga, sehingga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

(Nuraeni, 2012) menyatakan bahwa literasi ekonomi mencerminkan kemampuan seseorang dalam memahami dan menerapkan konsep ekonomi untuk membuat keputusan terkait penghasilan, tabungan, pengeluaran, serta alokasi keuangan secara bijak. Jappelli (2010) menekankan bahwa literasi ekonomi pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan, tetapi dalam realitasnya, tidak semua individu memiliki tingkat literasi ekonomi yang memadai. Akibatnya, peluang untuk mencapai kesejahteraan menjadi lebih terbatas. Salah satu indikator utama literasi ekonomi adalah kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efektif, sehingga individu dapat mengoptimalkan kesejahteraan finansialnya.

Berdasarkan berbagai pendapat dan penjelasan yang telah disampaikan, literasi ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan dalam memahami dan menerapkan konsep dasar ekonomi serta berpikir kritis dalam mengambil keputusan terkait aspek ekonomi. Dengan memiliki literasi ekonomi yang baik, seseorang dapat mengelola sumber daya ekonomi secara bijak guna mencapai kesejahteraan melalui penerapan prinsip ekonomi yang tepat. Selain itu, literasi ekonomi berperan penting dalam meningkatkan pemahaman individu mengenai biaya dan manfaat suatu barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif.

#### **2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

UNDP (*United Nation Development Programme*) Pengembangan manusia didefinisikan sebagai proses yang mencoba memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat umum. Pengguna dipandang sebagai tujuan akhir dalam konsep ini, sementara proses pembangunan dipandang sebagai sarana (atau sarana utama) untuk mencapai tujuan tersebut. Empat faktor kunci yang perlu

dipertimbangkan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan manusia tercapai adalah produktivitas, ketekunan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995). *Produktivitas*, Individu harus diberikan alat yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih produktif dan sepenuhnya terlibat dalam proses yang menghasilkan pendapatan dan menyediakan mata pencaharian. Oleh karena itu, salah satu bagian dari model pembangunan manusia adalah pembangunan ekonomi. *pemerataan*, setiap orang harus dapat mengakses semua sumber daya sosial dan ekonomi secara setara. Agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang dan terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, semua hambatan yang menghalangi akses harus dihilangkan. *Kesinambungan*, Kita perlu memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, bukan hanya generasi berikutnya. Setiap sumber daya-alam, manusia, dan fisik-dapat diperbaharui. *Pemberdayaan* mengharuskan individu untuk mengambil peran aktif dalam pilihan dan prosedur yang akan membentuk kehidupan mereka serta terlibat dan mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan.

Kekayaan negara yang sesungguhnya terletak pada rakyatnya. Pembangunan manusia memandang manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dan bukan sekadar alat (Pratama, 2018). Tujuan utama pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan orang untuk hidup sehat dan panjang umur serta menjadi anggota masyarakat yang produktif (UNDP, 1995). Dengan memodifikasi pengeluaran per kapita dan menghitung Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) maksimum 85 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 18 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 tahun, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebuah wilayah menunjukkan kapasitasnya untuk mencapai persentase yang telah ditetapkan. Jika nilai IPM suatu daerah hampir mencapai 100%, maka daerah tersebut dianggap memiliki status IPM yang sangat tinggi dan dapat memenuhi tujuan untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mendukung perekonomian daerah.

### Metode Baru Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Komponen

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa dimensi pengeluaran, kesehatan, dan pendidikan adalah tiga komponen yang digunakan untuk menentukan indeks pembangunan manusia.

Menghitung IPM, IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{Kesehatan \times Pendidikan \times Pengeluaran}$$

Menghitung indeks komponen, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi pengeluaran.

$$i_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

$$i_{Pendidikan} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

$$i_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan min})}{\ln(\text{pendapatan maks}) - \ln(\text{pendapatan min})}$$

#### 2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Prameshti, R. N. (2013), Pengangguran merupakan individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Menurut Mankiw (2012), tingkat pengangguran terbuka diartikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terjadi ketika angkatan kerja aktif yang sedang mencari pekerjaan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Tingkat pengangguran terbuka menacu pada angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan karena jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas tidak mampu mengimbangi jumlah tenaga kerja yang

terus meningkat, sehingga menyebabkan semakin banyak orang yang menganggur. Akibatnya angkatan kerja yang tidak dapat menentukan pekerjaan dalam waktu yang lama akan terjerumus dalam tingkat pengangguran terbuka. Sehingga dalam perhitungannya yaitu :

$$TPT = \frac{\text{Jumlah penduduk menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Jika tingkat pengangguran terbuka tinggi, berarti masih ada angkatan kerja yang belum dapat terserap di pasar kerja. Contohnya, jika pengangguran terbuka mencapai 10% artinya dari setiap 100 angkatan kerja terdapat 10 orang yang menganggur.

(Sukirno 2013), pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu :

1. Pengangguran friksional, yang terjadi ketika tenaga kerja meninggalkan pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yang disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja
3. Pengangguran siklikal, yang timbul akibat penurunan kegiatan ekonomi, seperti yang terjadi ketika suatu perusahaan mengalami kelesuan dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
4. Pengangguran teknologi, yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin, sehingga mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia dan meningkatkan tingkat pengangguran.

### 2.2.6. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) bagi pekerja untuk menjamin penghidupan yang layak. UMP berfungsi sebagai batas terendah upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan ditetapkan setiap tahun melalui kebijakan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003).

Menurut Simanjuntak (2001), upah merupakan balas jasa yang diterima tenaga kerja sebagai imbalan atas kontribusi yang diberikan dalam proses produksi. Sementara itu, Mankiw (2016) menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum merupakan instrumen pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun pada saat yang sama dapat memengaruhi struktur biaya produksi dan permintaan tenaga kerja.

#### A. Teori Upah dalam Perspektif Ekonomi

Dalam teori ekonomi klasik, upah ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kenaikan upah minimum di atas tingkat keseimbangan pasar berpotensi menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja atau pengangguran (Borjas, 2016). Namun, dalam perspektif ekonomi Keynesian dan institusional, kebijakan upah minimum dapat meningkatkan daya beli pekerja, mendorong konsumsi, serta menstimulasi aktivitas ekonomi (Todaro & Smith, 2020).

Teori *Efficiency Wage* juga menjelaskan bahwa upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan motivasi, kesehatan, dan loyalitas pekerja, sehingga berdampak positif terhadap output dan pendapatan usaha (Akerlof & Yellen, 1986). Dalam konteks UMKM, peningkatan UMP dapat menjadi dorongan peningkatan

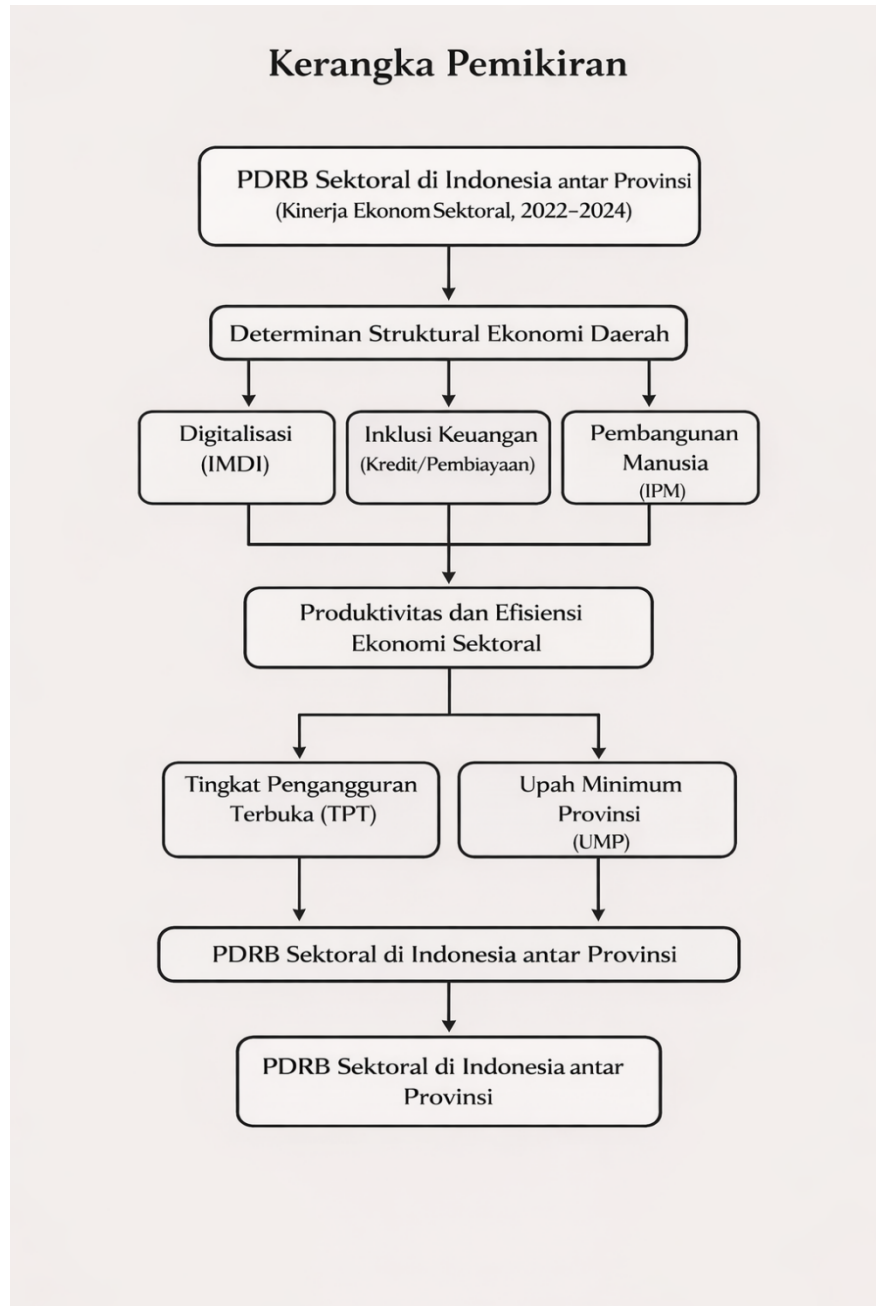
kualitas tenaga kerja, meskipun berpotensi meningkatkan biaya produksi bagi pelaku usaha.

## **B. Upah Minimum Provinsi dan Kinerja Ekonomi Daerah**

Upah Minimum Provinsi memiliki keterkaitan erat dengan kinerja ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kenaikan UMP dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli, sehingga mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, termasuk produk UMKM (Sukirno, 2015). Dengan meningkatnya permintaan, pendapatan UMKM berpotensi meningkat.

Namun, di sisi lain, peningkatan UMP juga dapat meningkatkan biaya produksi UMKM, khususnya bagi usaha padat karya dengan modal terbatas. Kondisi ini dapat menekan keuntungan usaha apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas atau efisiensi (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, pengaruh UMP terhadap pendapatan UMKM bersifat ambivalen dan kontekstual, bergantung pada struktur usaha dan kondisi ekonomi daerah.

### 2.3. Kerangka Pemikiran



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah pemahaman konseptual penelitian, disusun kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara determinan struktural ekonomi daerah dan kinerja ekonomi sektoral yang diukur melalui PDRB sektor usaha antarprovinsi di Indonesia periode 2022–2024. Kerangka ini berlandaskan teori pembangunan ekonomi regional, pertumbuhan endogen, human capital, dan ekonomi tenaga kerja, yang menekankan bahwa output sektoral dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, intermediasi keuangan, serta dinamika pasar tenaga kerja. Digitalisasi (IMDI) dan inklusi keuangan (kredit/pembiayaan) berperan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ekspansi usaha sektoral, sementara pembangunan manusia (IPM) mencerminkan kualitas tenaga kerja yang mendorong daya saing ekonomi daerah. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan upah minimum provinsi (UMP) memengaruhi struktur biaya produksi, daya beli, serta penyerapan tenaga kerja sektoral. Secara simultan, seluruh variabel tersebut menentukan produktivitas dan efisiensi ekonomi sektoral yang tercermin dalam PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi di Indonesia.

## **2.4. Hubungan Variabel**

### **2.4.1. Hubungan Literasi Digital terhadap Pendapatan UMKM**

Literasi digital merupakan kemampuan masyarakat dan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk mengakses informasi, berinteraksi, serta mendukung aktivitas ekonomi (OECD, 2018). Dalam konteks pembangunan ekonomi regional, literasi digital tidak lagi diposisikan pada level individu atau UMKM semata, melainkan sebagai bagian dari transformasi struktural yang mendorong efisiensi, produktivitas, dan integrasi pasar antarwilayah. Tingkat digitalisasi yang tinggi memungkinkan sektor-sektor usaha memanfaatkan teknologi untuk optimalisasi rantai pasok, perluasan akses pasar, penurunan biaya transaksi, serta peningkatan inovasi produk dan layanan. Sasmito dan Prestianto (2021) menunjukkan bahwa kapasitas digital berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha, sementara

Rahmadan et al. (2021) menemukan bahwa implementasi ekonomi digital meningkatkan efisiensi dan akses pasar secara signifikan. Secara makro, peningkatan literasi dan infrastruktur digital akan memperkuat produktivitas sektoral dan daya saing ekonomi daerah, sehingga berimplikasi positif terhadap peningkatan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

#### **2.4.2. Hubungan Literasi Ekonomi terhadap Pendapatan UMKM**

Literasi ekonomi dalam konteks pembangunan regional merujuk pada kemampuan masyarakat dan pelaku ekonomi dalam memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi, pengelolaan sumber daya, mekanisme pasar, serta pengambilan keputusan yang rasional (Lusardi & Mitchell, 2014). Pada level makro, literasi ekonomi tercermin dalam kualitas pengelolaan modal, efisiensi alokasi sumber daya, serta kemampuan sektor-sektor usaha dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan intermediasi keuangan secara produktif. Ningsih dan Pratama (2021) menunjukkan bahwa pemahaman ekonomi yang baik berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan berkelanjutan, sementara Rahmadan et al. (2021) menegaskan bahwa kapasitas dalam mengelola biaya, menentukan harga, dan mengoptimalkan laba meningkatkan kinerja ekonomi. Secara struktural, tingkat literasi ekonomi dan inklusi keuangan yang tinggi akan memperkuat efisiensi produksi, memperluas ekspansi usaha sektoral, serta meningkatkan produktivitas faktor produksi. Dengan demikian, literasi ekonomi memiliki hubungan positif terhadap peningkatan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

#### **2.4.3. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pendapatan UMKM**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (UNDP, 2020). Dalam konteks pembangunan ekonomi regional, IPM merepresentasikan kualitas

sumber daya manusia yang menjadi faktor fundamental dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor-sektor ekonomi. Wilayah dengan IPM yang lebih tinggi umumnya memiliki tenaga kerja yang lebih terdidik, sehat, dan adaptif terhadap perubahan teknologi, sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi sektoral. Ulyati et al. (2024) menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan temuan tersebut diperkuat oleh Jannah et al. (2025) yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara struktural, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong optimalisasi faktor produksi dan ekspansi aktivitas sektoral, sehingga berimplikasi pada peningkatan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

#### **2.4.4. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pendapatan UMKM**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan (BPS, 2023). Dalam perspektif makroekonomi regional, tingginya TPT mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan faktor produksi tenaga kerja serta adanya ketidakseimbangan di pasar kerja. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kapasitas produksi dan melemahnya aktivitas ekonomi sektoral suatu wilayah. Sari dan Fisabilillah (2023) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena berkurangnya partisipasi tenaga kerja dalam proses produksi serta menurunnya konsumsi rumah tangga. Secara struktural, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar idle capacity dalam perekonomian, sehingga output sektoral yang dihasilkan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif terhadap PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

#### **2.4.5. Hubungan Upah Minimum Provinsi terhadap Pendapatan UMKM**

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan standar upah minimum guna menjamin kesejahteraan pekerja dan menjaga daya beli masyarakat (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022). Dalam perspektif makroekonomi regional, UMP memengaruhi struktur biaya produksi, tingkat konsumsi rumah tangga, serta dinamika pasar tenaga kerja. Peningkatan UMP berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat terhadap output sektoral. Namun, di sisi lain, kenaikan UMP juga dapat meningkatkan biaya produksi, terutama pada sektor-sektor padat karya, sehingga memengaruhi efisiensi dan keputusan ekspansi usaha. Lokiman et al. (2013) menunjukkan bahwa UMP berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan berdampak pada PDRB daerah. Oleh karena itu, pengaruh UMP terhadap kinerja ekonomi sektoral bersifat dua arah, bergantung pada keseimbangan antara peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penyesuaian biaya produksi, yang pada akhirnya tercermin dalam perubahan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

#### **2.5. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut, dan didasarkan pada beberapa teori yang telah diuraikan.

- a. Diduga literasi digital berpengaruh positif terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).
- b. Diduga literasi ekonomi berpengaruh positif terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).
- c. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).

- d. Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).
- e. Diduga Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat sistematis dan bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis secara statistik. Metode kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik analisis data yang bersifat numerik atau statistik (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini digunakan data panel yang merupakan kombinasi data time series periode 2022–2024 dan data cross section sebanyak 38 provinsi di Indonesia. Variabel dependen yang dianalisis adalah PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral, sedangkan variabel independennya meliputi literasi digital, inklusi keuangan/literasi ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum provinsi (UMP). Pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh determinan struktural tersebut terhadap kinerja ekonomi sektoral antarprovinsi di Indonesia.

#### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 2005).

##### **3.2.1. Variabel Independen**

Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi. Oleh karena itu, variabel independen yang dianalisis adalah faktor-faktor struktural yang secara teoritis memengaruhi output ekonomi sektoral, yaitu literasi digital, literasi ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum

provinsi (UMP). Kelima variabel tersebut diposisikan sebagai determinan yang memengaruhi produktivitas, efisiensi, kualitas tenaga kerja, serta dinamika pasar tenaga kerja yang pada akhirnya berdampak pada kinerja ekonomi sektoral daerah.

#### 1. Variabel Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan individu maupun pelaku ekonomi dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Gilster (1997) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital, sedangkan Bawden (2001) menekankan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dalam konteks pembangunan ekonomi regional, literasi digital mencerminkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung transformasi teknologi pada sektor-sektor usaha, termasuk pemanfaatan sistem informasi, digitalisasi proses produksi, pemasaran berbasis platform, serta integrasi rantai pasok. Tingkat literasi digital yang tinggi akan meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan inovasi sektoral sehingga memperkuat daya saing ekonomi daerah. Dengan demikian, literasi digital diposisikan sebagai faktor struktural yang berpotensi meningkatkan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

#### 2. Variabel Literasi Ekonomi

Literasi ekonomi merupakan kemampuan individu maupun pelaku ekonomi dalam memahami konsep-konsep dasar ekonomi, seperti pengelolaan sumber daya, perencanaan keuangan, pengambilan keputusan rasional, serta pemahaman terhadap mekanisme pasar. Huston (2010) menyatakan bahwa literasi ekonomi mencakup pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan informasi ekonomi untuk membuat

keputusan yang efektif, sementara Japelli (2010) menegaskan bahwa literasi ekonomi berfungsi sebagai modal kognitif yang memengaruhi perilaku dan kinerja ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi regional, literasi ekonomi mencerminkan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha dalam mengalokasikan modal secara efisien, memanfaatkan akses pembiayaan, serta merespons dinamika pasar secara produktif. Tingkat literasi ekonomi yang tinggi akan mendorong efisiensi produksi, optimalisasi biaya, dan peningkatan produktivitas sektoral. Oleh karena itu, literasi ekonomi diposisikan sebagai faktor struktural yang berpotensi meningkatkan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

### 3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak sebagaimana dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks kinerja ekonomi regional, IPM merepresentasikan kualitas tenaga kerja yang menentukan tingkat produktivitas, kemampuan adopsi teknologi, serta efisiensi proses produksi pada berbagai sektor usaha. Daerah dengan IPM yang lebih tinggi umumnya memiliki tenaga kerja yang lebih terampil, sehat, dan adaptif terhadap perubahan struktural ekonomi, sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing sektoral. Dengan demikian, IPM diposisikan sebagai determinan yang berpengaruh terhadap peningkatan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

### 4. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan atau

mempersiapkan usaha, yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan tingkat pemanfaatan sumber daya manusia suatu wilayah (BPS). Dalam perspektif ekonomi regional, TPT yang tinggi menunjukkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan adanya idle capacity dalam proses produksi sektoral. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya utilisasi faktor tenaga kerja yang dapat menghambat produktivitas dan kapasitas output sektor-sektor ekonomi. Sebaliknya, penurunan TPT mencerminkan meningkatnya partisipasi tenaga kerja dalam kegiatan produksi, yang berpotensi mendorong ekspansi aktivitas ekonomi sektoral. Oleh karena itu, TPT diposisikan sebagai indikator struktural pasar tenaga kerja yang memengaruhi PDRB sektor usaha sebagai ukuran kinerja ekonomi sektoral provinsi.

#### 5. Variabl Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai jaring pengaman untuk menjamin kesejahteraan pekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perspektif ekonomi regional, UMP memengaruhi struktur biaya produksi, tingkat konsumsi rumah tangga, serta dinamika pasar tenaga kerja. Kenaikan UMP berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat terhadap output sektoral. Namun, di sisi lain, peningkatan UMP juga dapat menambah beban biaya produksi, khususnya pada sektor-sektor padat karya, yang dapat memengaruhi efisiensi dan keputusan ekspansi usaha. Oleh karena itu, UMP diposisikan sebagai variabel kebijakan ketenagakerjaan yang memengaruhi produktivitas, struktur biaya, dan pada akhirnya PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

### 3.2.2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan bukan lagi pendapatan pelaku UMKM, melainkan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi. PDRB sektor usaha didefinisikan sebagai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi pada sektor-sektor usaha di suatu wilayah dalam periode tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), PDRB merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi daerah karena mencerminkan tingkat produksi, produktivitas, dan kontribusi sektoral terhadap perekonomian regional. Penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) agar perubahan yang dianalisis mencerminkan pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi fluktuasi harga. Dengan demikian, PDRB sektor usaha diposisikan sebagai proksi kinerja ekonomi sektoral yang dipengaruhi oleh literasi digital, literasi ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi dalam kerangka pembangunan ekonomi regional.

### 3.3. Metode Analisis

Analisis data panel akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana faktor independen mempengaruhi variabel dependen. Data panel dapat melihat dinamika berbagai variabel dari waktu ke waktu dengan menggabungkan data lintas bagian dan data deret waktu. Data lintas bagian dan deret waktu digabungkan untuk membuat data panel. Penelitian ini mengkaji data dari 38 Provinsi di Indonesia dari tahun 2022 – 2024 menggunakan analisis data panel. Penelitian regresi menggunakan data panel melihat bagaimana variasi dalam unit dan perubahan dari waktu ke waktu mempengaruhi hubungan antara faktor independen dan variabel dependen. Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki format berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 LD_{it} + \beta_2 LE_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

### 3.3.1. Estimasi Regresi Data Panel

Tiga asumsi model sering digunakan dalam aplikasi regresi data panel: pendekatan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*.

### 3.3.2. Motode Common Effect

Model *common effect* adalah model yang paling sederhana di antara tiga model yang dihasilkan dari analisis regresi data panel. Asumsi utamanya adalah bahwa slope dan intersep selalu konstan baik antar individu maupun antar waktu Sriyana (2014). Pendekatan sistematis dari model *common effect* ini melibatkan penggabungan data time series dan cross section ke dalam satu pool data, kemudian melakukan regresi dengan menggunakan metode OLS. Bentuk umum dari persamaan model *common effect* adalah sebagai berikut.

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 LD_{it} + \beta_2 LE_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$PDRB_{it}$	: PDRB Sektor Usaha
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	: Koefisien LD, LE, IPM, TPT, UMP
$LD_{it}$	: Literasi Digital
$LE_{it}$	: Literasi Ekonomi
$IPM_{it}$	: Indeks Pembangunan Manusia
$TPT_{it}$	: Tingkat Pengangguran Terbuka
$UMP_{it}$	: Upah Minimum Provinsi
$\varepsilon_{it}$	: Variabel gangguan ( <i>error</i> )

### 3.3.3. Model Fixed Effect

Pendekatan model *Fixed Effect* memperkirakan bahwa intersep dari setiap individu berbeda, sementara kemiringan antar individu tetap atau sama. Pendekatan ini memanfaatkan variabel *dummy* untuk mencerminkan perbedaan intersep antar individu. Model *Fixed Effect* dengan menggunakan variabel *dummy* dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 LD_{it} + \beta_2 LE_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 UMP_{it} \\ + \beta_6 D_{1t} + \beta_7 D_{2t} + \beta_8 D_{3t} + \varepsilon_{it}$$

Metode ini dikenal sebagai *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Selain mampu mengatasi efek individu, LSDV juga efektif dalam menangani efek waktu yang bersifat sistematis dengan memasukkan variabel *dummy* waktu ke dalam model.

### 3.3.4. Model Random Effect

Model *random effect* mirip dengan model *fixed effect*. Perbedaannya terletak pada cara penanganan perbedaan intersep. Jika pada model *fixed effect*, perbedaan intersep diakomodasi langsung karena ada perbedaan antara individu dan waktu, sedangkan pada model *random effect*, perbedaan intersep antara individu dan waktu disebabkan oleh *residual/error* yang terjadi secara acak. Model *random effect* menggunakan teknik *generalized least square* (GLS). Persamaan regresi pada model *random effect* juga menggunakan variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan antara individu. Secara umum, persamaan regresi dari model *random effect* dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \bar{\beta}_0 + \beta_1 LD_{it} + \beta_2 LE_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 TPT_{it} \\ + \beta_5 UMP_{it} \sum_{k=1}^n \alpha_k D_{ki} + (\varepsilon_{it} + \mu_i)$$

### 3.4. Pemilihan Model Regresi

Terdapat tiga model alternatif untuk mengestimasi regresi data panel, kita perlu memilih satu model yang paling optimal dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen. Proses pemilihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah membandingkan *model common effect* dan *model fixed effect*. Tahap kedua adalah membandingkan *model fixed effect* dengan *model random effect*. Dengan menggunakan alat bantu *Stata*, kedua tahap pengujian ini dapat dilakukan dengan *uji Chow* (antara *common effect* dan *fixed effect*), *uji Hausman* (antara *fixed effect* dan *random effect*), dan *uji Lagrange Multiple* (antara *random effect* dan *common effect*).

#### 3.4.1. Uji Chow

*Uji Chow* (*Chow test*) diterapkan untuk menentukan pilihan yang optimal antara model *fixed effect* dan model *common effect* (Basuki dan Prawoto, 2016). Jika model *fixed effect* terbukti lebih superior daripada *model common effect*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji *Hausman*. Namun, jika model *common effect* lebih baik, maka tidak perlu melanjutkan ke uji *Hausman*, dan model *common effect* akan menjadi pilihan yang lebih tepat untuk analisis regresi. Uji *fixed effect* dapat dilakukan menggunakan uji F-statistik. Berikut ini adalah formulanya.

$$F = \frac{SSR_R - SSR_U/q}{SSR_U/(n - k)}$$

Keterangan:

$SSR_R$	:	<i>restricted sum squared of residuals</i>
$SSR_U$	:	<i>unrestricted sum squared of residuals</i>
$q$	:	jumlah restriksi/pembatas dalam mode
$n$	:	jumlah observasi

$k$  : jumlah parameter estimasi

Hipotesis dari uji *Chow* ini adalah sebagai berikut.

$H_0 = \text{common effect model}$  lebih baik dari pada  $\text{fixed effect model}$

$H_1 = \text{fixed effect model}$  lebih baik dari pada  $\text{common effect model}$

Penentuan antara hipotesis nul ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) terjadi dengan membandingkan nilai F-statistik dengan nilai kritis F. Jika nilai F-statistik lebih rendah dari nilai kritis F, maka hipotesis nul ( $H_0$ ) akan ditolak. Sebaliknya, jika nilai F-statistik lebih tinggi dari nilai kritis F, maka keputusan yang diambil adalah tidak menolak hipotesis nul ( $H_0$ ) atau menerima hipotesis alternatif ( $H_1$ ).

### 3.4.2. Uji Hausman

Apabila uji *Chow* menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih cocok, maka uji Hausman (*Hausman test*) dilakukan untuk menentukan model yang lebih optimal antara *fixed effect* dan *random effect* (Basuki dan Prawoto, 2016). Formula untuk menghitung nilai uji *Hausman* dapat ditemukan di bawah ini.

$$m = \hat{q} \text{var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

Keterangan

$m$  : nilai *Chi-squares* statistik dari uji *Hausman*  
 $\hat{q}$  : perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien  
 $\text{var}(\hat{q})$  : kovarian matriks perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien

Hipotesis dari uji *Hausman* adalah sebagai berikut.

$H_0 = \text{random effect model}$  lebih baik dari pada  $\text{fixed effect model}$

$H_1 = \text{fixed effect model}$  lebih baik dari pada  $\text{random effect model}$

Hasil dari uji *Hausman* mengikuti distribusi *Chi-square*. Penentuan antara hipotesis nul ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) terjadi dengan membandingkan nilai statistik *Chi-square* dengan nilai kritis *Chi-square*. Nilai kritis *Chi-square* dapat ditemukan di dalam tabel distribusi *Chi-square* dengan *degree of freedom* (k) yang sesuai dengan jumlah variabel independen. Apabila nilai kritis *Chi-square* lebih besar dari nilai statistik *Chi-square*, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nul ( $H_0$ ). Sebaliknya, jika nilai kritis *Chi-square* lebih kecil dari nilai statistik *Chi-square*, maka keputusan yang diambil adalah tidak menolak hipotesis nul ( $H_0$ ) atau menerima hipotesis alternatif ( $H_1$ ).

### 3.4.3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

adalah tes untuk menentukan apakah *model Random Effect* atau *model Common Effect* (OLS) yang harus digunakan. Uji signifikansi *Random Effect* ini diperkenalkan oleh *Breusch Pagan*. Metode *Breusch Pagan* untuk uji signifikansi *Random Effect* berdasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Nilai statistik LM dihitung menggunakan formula berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[ \frac{\sum_{i=1}^n (T\hat{e}_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^n e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Keterangan

n : jumlah Individu

T : jumlah periode waktu

e : residual metode *Common Effect* (OLS)

Hipotesis dari uji Hausman adalah sebagai berikut

$H_0$  : *Common Effect Model* lebih baik dari pada *Random Effect Model*

$H_1$  : *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Common Effect Model*

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang bergantung pada distribusi *chi-square* dengan derajat kebebasan sebanding dengan jumlah variabel independen, digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai Widarjono (2009). Jika nilai statistik LM melebihi nilai kritis *chi-square*, maka hipotesis nul ditolak dan metode *Random Effect* dipilih dibandingkan metode *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai statistik LM lebih kecil dari nilai kritis *chi-square*, maka hipotesis nul diterima dan metode *Common Effect* digunakan daripada metode *Random Effect*. Namun, dalam konteks ini, uji LM tidak diperlukan karena uji *Chow* dan uji *Hausman* menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* adalah yang paling sesuai. Uji LM hanya relevan jika uji *Chow* menyatakan bahwa model *Common Effect* lebih cocok dan uji *Hausman* menunjukkan bahwa model *Random Effect* adalah yang paling tepat. Dalam situasi ini, uji LM diperlukan sebagai langkah akhir untuk menetapkan model mana yang lebih tepat, apakah *Common Effect* atau *Random Effect*.

### 3.5. Uji Statistika

Teknik statistik yang disebut pengujian hipotesis digunakan untuk menguji pernyataan atau praduga pada parameter populasi yang didasarkan pada data sampel. Tujuan utama pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui apakah ada cukup bukti dalam data sampel untuk mendukung klaim tertentu tentang populasi.

#### 3.5.1. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F, yang dikenal juga sebagai uji kecocokan model, merupakan metode pengujian yang memastikan apakah semua variabel independen memiliki dampak

pada variabel dependen. Nilai statistik F dapat dihitung menggunakan formula khusus.

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{1 - R^2/(n - k)}$$

Keterangan :

$F$	:	nilai F statistik
$R^2$	:	koefisien determinasi
$n$	:	jumlah observasi
$k$	:	jumlah parameter estimasi

Prosedur pengujian uji F melibatkan perbandingan antara nilai F hitung dengan nilai kritis F. Nilai kritis F dapat ditemukan dengan menentukan *degree of freedom*. Dalam tabel distribusi F, terdapat dua derajat kebebasan, yaitu df(N1) dan df(N2), yang dapat dihitung dengan rumus spesifik.

$$\text{df(N1)} \quad : \quad k - 1$$

$$\text{Df(N2)} \quad : \quad n - k$$

Kemudian, uji F memerlukan pembentukan hipotesis untuk menentukan tindakan selanjutnya. Hipotesis yang dibuat dari hasil uji F adalah sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0, \quad \text{secara simultan tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.}$$

$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$  secara simultan ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Penentuan antara hipotesis nul (H0) dan hipotesis alternatif (H1) bergantung pada perbandingan antara nilai F-statistik dan nilai F kritis. Jika nilai F kritis lebih tinggi dari nilai F-statistik, maka hipotesis nul (H0) ditolak. Sebaliknya, jika nilai F kritis lebih rendah dari nilai F-statistik, maka hipotesis nul (H0) tidak ditolak, atau hipotesis alternatif (H1) diterima.

### 3.5.2. Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Pengujian signifikansi variabel independen, umumnya dikenal sebagai uji t, mengacu pada tabel distribusi t. Tujuan uji ini adalah untuk menilai dampak variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Nilai kritis t dapat diidentifikasi dengan merujuk pada tabel distribusi t yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 5% (0,05), sehingga nilai t kritis dapat ditemukan dengan mencari df (*degree of freedom*) menggunakan rumus  $df = n - k$ . Di mana, n merupakan jumlah observasi, dan k merupakan jumlah variabel yang dianalisis (termasuk variabel independen dan dependen). Nilai Uji Signifikansi Variabel Independen dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$t = \frac{C_o}{SE}$$

$t$  : nilai t statistik

$C_o$  : koefisien dari variabel regresi

$SE$  : *standar error*

Keterangan:

Keputusan yang didasarkan pada hipotesis di atas ditentukan dengan mempertimbangkan perbandingan antara nilai t kritis dan nilai t-statistik. Jika nilai t kritis lebih besar daripada nilai t-statistik, maka hipotesis nul ( $H_0$ ) ditolak. Sebaliknya, jika nilai t kritis lebih kecil daripada nilai t-statistik, maka hipotesis nul ( $H_0$ ) tidak ditolak, atau hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima.

Merumuskan Hipotesis:

$H_0 : \beta_i = 0$

Hipotesis Nol ( $H_0$ ): Koefisien regresi dari variabel independen tidak signifikan, yaitu sama dengan nol.

### 3.6. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian garis regresi dengan nilai sebenarnya Widarjono (2013). Rentang nilai koefisien determinasi adalah 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin baik variabel dependen dalam menjelaskan variasi-variabel independen. Perhitungan nilai koefisien determinasi dapat dilakukan menggunakan rumus berikut.

$$R^2 = \frac{ESC}{ESC + RSS}$$

Keterangan:

$R^2$  : koefisien determinasi

$ESS$  : *explained sum of squares*

$RSS$  : *residual sum of squares*

Penambahan jumlah variabel independen akan meningkatkan nilai koefisien determinasi. Dalam penanganannya, solusi yang digunakan adalah *adjusted R<sup>2</sup>*, yaitu versi koefisien determinasi yang telah disesuaikan.

### 3.7. Cross Section Effect

*Cross Section Effect* (Efek Cross-Sectional) adalah efek yang muncul dari data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai unit observasi (seperti individu, perusahaan, negara, dll.) pada satu titik waktu tertentu atau dalam satu periode waktu yang sama. Dalam konteks ekonometrika atau analisis statistik, *cross section effect* mengacu pada perbedaan karakteristik antar unit observasi yang tidak berubah selama periode pengamatan, dan yang dapat mempengaruhi variabel yang diteliti. *Cross section effect* menjadi penting ketika melakukan analisis panel data, yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Dalam model panel data, efek ini bisa dianggap sebagai *fixed effect* (jika dianggap tidak acak dan tetap pada tiap unit) atau *random effect* (jika dianggap sebagai komponen acak).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi dan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel, yang mengombinasikan data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* mencakup periode tahun 2022–2024, sedangkan data *cross section* terdiri dari 38 Provinsi di Indonesia yang menjadi objek penelitian. Penggunaan data panel memungkinkan peneliti untuk menangkap variasi data antarwilayah sekaligus perubahan variabel penelitian dari waktu ke waktu, sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif dan akurat dibandingkan dengan penggunaan data *time series* atau *cross section* secara terpisah (Baltagi, 2005).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi dan kredibel, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data dari BPS digunakan untuk variabel dependen berupa PDRB sektor usaha atas dasar harga konstan (ADHK) sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral, serta untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Data IMDI digunakan untuk merepresentasikan literasi digital, sedangkan data dari OJK digunakan untuk variabel literasi ekonomi yang diprosikan melalui indikator kredit atau pembiayaan sektor usaha sebagai bentuk intermediasi keuangan. Seluruh data yang digunakan telah dipublikasikan secara resmi dan memiliki tingkat validitas serta reliabilitas yang tinggi sehingga layak digunakan dalam analisis empiris mengenai determinan kinerja ekonomi sektoral antarprovinsi di Indonesia periode 2022–2024.

**Tabel 4. 1 Statistika Deskriptif**

	PDRB	LD	LE	IPM	TPT	UMP
Mean	245694,5	48,375	188728,1	53,77632	3,236842	2046037
Maximum	2151041	69	4136648	83	8	5067381
Minimum	0	0	0	0	0	0
Std. Dev.	456663,7	11,79225	600155,3	31,4742	2,472998	1450934
Observasi	152	152	152	152	152	152

Sumber: Olah data Stata

Berdasarkan Tabel 4.1, variabel PDRB sektor usaha (PDRB) sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral memiliki nilai rata-rata sebesar 245.694,5. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat output ekonomi sektoral antarprovinsi selama periode 2022–2024 berada pada tingkat yang bervariasi. Nilai maksimum sebesar 2.151.041 mencerminkan adanya provinsi dengan kapasitas produksi dan aktivitas sektoral yang sangat tinggi, sedangkan nilai minimum sebesar 0 menunjukkan adanya wilayah atau periode tertentu dengan kontribusi sektoral yang sangat rendah atau belum tercatat secara optimal. Standar deviasi sebesar 456.663,7 mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar antarprovinsi dan antarperiode, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas kinerja ekonomi sektoral yang signifikan di Indonesia selama periode penelitian.

Untuk variabel literasi digital (LD), nilai rata-rata tercatat sebesar 48,375, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat literasi digital masyarakat di provinsi-provinsi penelitian berada pada kategori menengah. Nilai maksimum sebesar 69 mencerminkan adanya provinsi dengan tingkat literasi digital yang relatif tinggi, sedangkan nilai minimum sebesar 0 menunjukkan masih adanya daerah dengan tingkat literasi digital yang sangat rendah. Nilai standar deviasi sebesar 11,79225 menandakan bahwa terdapat variasi literasi digital yang cukup besar antarprovinsi dan antarperiode, yang mengindikasikan ketimpangan akses dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.

Variabel literasi ekonomi (LE) yang diproksikan melalui penyaluran kredit atau pembiayaan sektor usaha memiliki nilai rata-rata sebesar 188.728,1. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat intermediasi keuangan antarprovinsi selama periode 2022–2024 berada pada level yang cukup bervariasi. Nilai maksimum sebesar 4.136.648 mencerminkan adanya provinsi dengan tingkat penyaluran kredit sektor usaha yang sangat tinggi, yang mengindikasikan kapasitas pembiayaan dan dukungan modal yang kuat terhadap aktivitas ekonomi sektoral. Sementara itu, nilai minimum sebesar 0 menunjukkan adanya wilayah atau periode tertentu dengan tingkat penyaluran kredit yang sangat rendah atau belum tercatat. Variasi ini menggambarkan perbedaan akses dan pemanfaatan pembiayaan antarprovinsi yang secara teoritis berimplikasi pada perbedaan kapasitas produksi dan pada akhirnya memengaruhi PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral.

Selanjutnya, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai rata-rata sebesar 53,77632. Nilai maksimum IPM tercatat sebesar 83, sedangkan nilai minimum sebesar 0, yang menunjukkan adanya perbedaan capaian pembangunan manusia antarprovinsi selama periode penelitian. Standar deviasi sebesar 31,4742 mengindikasikan bahwa variasi kualitas sumber daya manusia antarwilayah tergolong tinggi, sehingga masih terdapat ketimpangan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Perbedaan kualitas sumber daya manusia tersebut secara teoritis berimplikasi pada variasi produktivitas tenaga kerja dan kapasitas produksi sektoral, yang pada akhirnya memengaruhi PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

Untuk variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT), nilai rata-rata tercatat sebesar 3,236842 persen, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat pengangguran di provinsi-provinsi penelitian selama periode 2022–2024 berada pada tingkat yang relatif terkendali. Nilai maksimum sebesar 8 persen mencerminkan adanya provinsi dan periode tertentu dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, sedangkan nilai minimum

sebesar 0 persen menunjukkan kondisi penyerapan tenaga kerja yang sangat baik pada wilayah tertentu. Standar deviasi sebesar 2,472998 mengindikasikan adanya variasi dinamika pasar tenaga kerja antarprovinsi dan antarperiode. Perbedaan tingkat pengangguran tersebut secara teoritis berimplikasi pada variasi pemanfaatan faktor tenaga kerja dan kapasitas produksi sektoral, yang pada akhirnya memengaruhi PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

Sementara itu, variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki nilai rata-rata sebesar 2.046.037 rupiah. Nilai maksimum UMP tercatat sebesar 5.067.381 rupiah, sedangkan nilai minimum sebesar 0, yang menunjukkan adanya perbedaan kebijakan pengupahan antarprovinsi selama periode 2022–2024. Standar deviasi sebesar 1.450.934 mengindikasikan bahwa variasi UMP antarwilayah tergolong tinggi, mencerminkan perbedaan tingkat kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi daerah, serta struktur pasar tenaga kerja. Perbedaan kebijakan pengupahan tersebut secara teoritis berimplikasi pada perubahan struktur biaya produksi dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kapasitas produksi dan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

## 4.2. Pemilihan Model Regresi

Tiga model dapat digunakan untuk menilai regresi data panel: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, atau *Random Effect Model*. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Berdasarkan hasil estimasi model regresi, maka tahap selanjutnya adalah menentukan model regresi yang paling sesuai. Untuk itu, dilakukan pengujian lebih lanjut guna memilih antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, atau *Random Effect Model*, sehingga hasil analisis dapat lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik data.

### 4.2.1. Chow Test

Dalam regresi data panel, uji Chow digunakan untuk mengevaluasi, membedakan, dan memilih model analisis optimal antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 2 Hasil Chow Test**

Effects Test	d.f.	Prob.
Cross-section F	(37,109)	0,0000

Sumber: Olah data Stata

Berdasarkan nilai probabilitas Cross-Section F sebesar 0,0000 kurang dari alpha ( $< \alpha = 5\%$ ), artinya menolak  $H_0$ . Sehingga model yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model*.

#### 4.2.2. Hausman Test

Tahap kedua untuk menemukan model terbaik peneliti menguji data penelitian dengan menggunakan Uji *Hausman*. Uji *Hausman* adalah uji yang digunakan untuk membandingkan dan memilih antara model *fixed effect* dengan *random effect*

**Tabel 4. 3 Hasil Hausman Test**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Prob.
Cross-section random	14,35	0,0025

Sumber: Olah data Stata

Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0025. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,0025 < 0,05$ ), sehingga gagal menerima hipotesis nol ( $H_0$ ). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara estimator *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Dengan demikian, model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Oleh karena itu, *Random Effect Model* tidak dipilih, dan

analisis selanjutnya dilakukan menggunakan Fixed Effect Model sebagai model estimasi terbaik.

### 4.3. Model Terbaik

#### 4.3.1. Fixed Effect Model

Hasil pengolahan data panel yang dilakukan melalui serangkaian pengujian pemilihan model, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman, menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam analisis selanjutnya adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Fixed Effect Model merupakan metode regresi data panel yang mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antarindividu atau antarunit analisis bersifat tetap (*time-invariant*) dan dapat ditangkap melalui perbedaan nilai intersep pada masing-masing unit. Menurut Widarjono (2018), model ini mengakomodasi heterogenitas individu dengan cara memasukkan variabel dummy atau perbedaan konstanta, sehingga pengaruh karakteristik khusus yang tidak teramati namun bersifat konstan dapat dikontrol secara efektif dalam model.

Lebih lanjut, *Fixed Effect Model* mengasumsikan bahwa komponen efek individual tersebut berkorelasi dengan variabel independen, sehingga penggunaan *Ordinary Least Squares* (OLS) atau *Random Effect Model* dapat menghasilkan estimasi yang bias. Dengan demikian, *Fixed Effect Model* mampu menghasilkan estimasi yang konsisten dan tidak bias dalam menganalisis pengaruh literasi digital, literasi ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi terhadap pendapatan UMKM (Widarjono, 2018).

**Tabel 4. 4 Fixed Effect Model**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	161579,1	115280,7	1,40	0,164
LD	596,3863	2063,876	0,29	0,773
LE	-0,9576049	0,2920907	-3,28	0,001
IPM	2226,09	1625,167	1,37	0,174
TPT	70301,8	23696,89	2,97	0,004
UMP	-0,0543854	0,0386062	-1,41	0,162
R.squared	0,4455			
F.statistic	17,52			
Prob (F-statistik)	0,0000			

Sumber: Olah data Stata

#### 4.3.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan dalam kasus ini untuk mengetahui apakah faktor-faktor independen yang digabungkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil prob (F-Statistic) yang sebesar  $0,0000 < \alpha$  (5%), artinya variabel Literasi Digital, Literasi Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Provinsi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan UMKM.

#### 4.3.3. Uji Parsial (Uji t)

1. Variabel literasi digital tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).
2. Variabel literasi ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).

3. Variabel IPM tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).
4. Variabel TPT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).
5. Variabel UMP tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral).

#### 4.3.4. Interpretasi Hasil

1. Nilai konstanta (C) sebesar 161.579,1 menunjukkan bahwa apabila variabel literasi digital, literasi ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum provinsi (UMP) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral memiliki nilai sebesar 161.579,1. Nilai ini merepresentasikan tingkat dasar output ekonomi sektoral yang dapat dicapai tanpa adanya perubahan pada variabel-variabel independen dalam model, sehingga mencerminkan komponen kinerja ekonomi yang tidak dijelaskan oleh faktor-faktor struktural yang dianalisis dalam penelitian ini.
2. Nilai koefisien variabel literasi digital (LD) koefisien bertanda positif, hasil uji statistik menunjukkan bahwa pengaruh literasi digital terhadap PDRB sektor usaha tidak signifikan secara statistik, yang tercermin dari nilai probabilitas sebesar 0,773. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi digital selama periode penelitian belum secara langsung berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja ekonomi sektoral antarprovinsi.
3. Nilai koefisien variabel literasi ekonomi (LE) sebesar  $-0,9576049$  menunjukkan bahwa apabila variabel lain dianggap konstan dan literasi ekonomi yang diprosikan melalui kredit atau pembiayaan sektor usaha meningkat sebesar satu satuan, maka PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral diperkirakan menurun sebesar 0,9576049. Koefisien ini bertanda negatif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5

persen, dengan nilai probabilitas sebesar 0,001. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan sektor usaha selama periode penelitian belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan output sektoral, yang dapat disebabkan oleh alokasi pembiayaan yang belum produktif, efisiensi penggunaan modal yang rendah, atau tingginya beban biaya pembiayaan yang memengaruhi kapasitas produksi sektoral.

4. Nilai koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Koefisien yang bertanda positif ini menunjukkan adanya hubungan searah antara kualitas pembangunan manusia dan kinerja ekonomi sektoral. Namun demikian, pengaruh IPM terhadap PDRB sektor usaha tidak signifikan secara statistik, dengan nilai probabilitas sebesar 0,174, sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia belum secara langsung memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekonomi sektoral selama periode pengamatan.
5. Nilai koefisien variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 70.301,8 menunjukkan bahwa apabila variabel lain dianggap konstan dan TPT meningkat sebesar satu persen, maka PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral diperkirakan meningkat sebesar 70.301,8. Koefisien ini bertanda positif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5 persen, dengan nilai probabilitas sebesar 0,004. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan TPT dalam periode penelitian berkorelasi dengan peningkatan kinerja ekonomi sektoral, yang dapat dijelaskan melalui pergeseran tenaga kerja ke sektor usaha mandiri atau sektor informal sehingga turut meningkatkan aktivitas dan kontribusi sektor usaha terhadap PDRB daerah.
6. Nilai koefisien variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) Koefisien yang bertanda negatif ini menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara kenaikan upah minimum dan kinerja ekonomi sektoral. Namun demikian, pengaruh UMP terhadap PDRB sektor usaha tidak signifikan secara statistik, yang tercermin dari nilai probabilitas sebesar 0,162, sehingga kenaikan UMP

belum terbukti secara nyata memengaruhi kinerja ekonomi sektoral selama periode penelitian.

#### **4.4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,4455 menunjukkan bahwa sebesar 44,55 persen variasi PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral) dapat dijelaskan oleh variabel literasi digital, literasi ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi. Sementara itu, sisanya sebesar 55,45 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

#### **4.5. Pembahasan**

Pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis yang diperoleh melalui penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

##### **4.5.1. Pengaruh Literasi Digital terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral)**

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa literasi digital tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi sektoral tidak dapat diterima secara statistik. Secara konseptual, literasi digital mencerminkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi dan proses produksi (Gilster, 1997; Bawden, 2001). Dalam konteks ekonomi regional, literasi digital berperan dalam mendorong efisiensi operasional, integrasi rantai pasok, perluasan akses pasar, serta peningkatan produktivitas sektoral melalui adopsi teknologi. Secara teoritis, peningkatan literasi digital seharusnya memperkuat transformasi digital pada berbagai sektor usaha, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah dan output riil yang tercermin dalam PDRB atas dasar harga konstan. Namun, tidak signifikannya pengaruh literasi digital dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital antarprovinsi di Indonesia masih bersifat gradual dan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan output sektoral secara nyata dalam jangka pendek.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosifa et al. (2024) yang menemukan bahwa literasi digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi. Kondisi tersebut dapat dijelaskan oleh adanya kesenjangan digital antarwilayah, perbedaan kualitas infrastruktur teknologi, serta variasi kemampuan adaptasi sektor usaha terhadap digitalisasi. Dengan demikian, peningkatan literasi digital saja belum cukup untuk secara langsung meningkatkan kinerja ekonomi sektoral tanpa diiringi oleh dukungan infrastruktur, integrasi teknologi dalam proses produksi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih komprehensif.

#### **4.5.2. Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral)**

Berdasarkan hasil regresi, literasi ekonomi yang diprosikan melalui penyaluran kredit atau pembiayaan antarprovinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa literasi ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi sektoral tidak dapat diterima. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan kredit atau pembiayaan selama periode penelitian justru diikuti oleh penurunan PDRB sektor usaha pada tingkat provinsi.

Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses pembiayaan di tingkat regional belum sepenuhnya diiringi dengan efektivitas alokasi dan pemanfaatan kredit pada sektor-sektor produktif. Secara konseptual, literasi ekonomi tidak hanya tercermin dari besarnya akses terhadap pembiayaan, tetapi juga dari kemampuan pelaku ekonomi dan sistem keuangan daerah dalam

mengalokasikan dana secara efisien untuk kegiatan yang meningkatkan produktivitas dan nilai tambah (Huston, 2010). Lusardi dan Mitchell (2014) menegaskan bahwa tanpa pemahaman dan pengelolaan keuangan yang memadai, pembiayaan dapat menimbulkan inefisiensi dan risiko beban keuangan. Dalam konteks makro, apabila kredit lebih banyak terserap pada sektor non-produktif, bersifat konsumtif, atau digunakan untuk menutup kewajiban jangka pendek, maka dampaknya terhadap peningkatan output riil sektoral menjadi terbatas.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan intermediasi keuangan tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan output sektoral apabila tidak diiringi dengan kualitas penyaluran kredit yang tepat sasaran dan produktif. Beban bunga, risiko kredit bermasalah, serta potensi misalokasi pembiayaan dapat menekan kinerja sektor usaha dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan nilai tambah regional. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perluasan akses pembiayaan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, efektivitas intermediasi, serta penguatan sektor-sektor produktif agar mampu mendorong peningkatan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

#### **4.5.3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral)**

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi sektoral tidak dapat diterima secara statistik. Secara teoritis, IPM merepresentasikan kualitas sumber daya manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang menjadi fondasi utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi proses produksi (UNDP, 2020). Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, kualitas modal manusia berperan dalam meningkatkan kapasitas

inovasi, adopsi teknologi, serta kemampuan manajerial yang pada akhirnya mendorong peningkatan output dan nilai tambah sektoral. Oleh karena itu, secara konseptual peningkatan IPM seharusnya berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB sektor usaha. Namun, tidak signifikannya pengaruh IPM dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia antarprovinsi belum secara langsung diterjemahkan menjadi peningkatan output sektoral dalam jangka pendek, atau masih memerlukan waktu (*time lag*) untuk memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kinerja ekonomi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh IPM terhadap kinerja ekonomi sektoral bersifat tidak langsung dan kemungkinan dimediasi oleh faktor lain seperti investasi, struktur industri, serta tingkat adopsi teknologi. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembangunan manusia perlu diintegrasikan dengan kebijakan penguatan sektor produktif dan transformasi struktural agar perbaikan kualitas sumber daya manusia dapat secara optimal mendorong peningkatan PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi.

#### **4.5.4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi sektoral tidak dapat diterima. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran justru diikuti oleh peningkatan PDRB sektor usaha selama periode pengamatan.

Temuan ini mengindikasikan adanya mekanisme penyesuaian struktural dalam perekonomian daerah, di mana meningkatnya pengangguran pada sektor formal mendorong pergeseran tenaga kerja ke sektor usaha mandiri, informal, atau sektor-sektor yang relatif lebih fleksibel dalam menyerap tenaga kerja. Dalam konteks ekonomi regional, fenomena ini dapat meningkatkan aktivitas produksi pada sektor usaha tertentu sehingga mendorong kenaikan output dan nilai tambah yang tercermin dalam PDRB sektoral. Dengan kata lain, sektor usaha berfungsi sebagai sektor penyangga (*buffer sector*) dalam menjaga dinamika ekonomi daerah ketika pasar tenaga kerja formal mengalami tekanan.

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran tidak selalu identik dengan penurunan kinerja ekonomi sektoral, terutama apabila sektor usaha mampu menyerap tenaga kerja dan mempertahankan aktivitas produksi. Namun demikian, kondisi ini juga dapat mencerminkan karakteristik struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor informal dan padat karya. Oleh karena itu, pengaruh positif pengangguran terhadap PDRB sektor usaha perlu dipahami sebagai fenomena adaptif jangka pendek, bukan sebagai indikasi bahwa pengangguran secara struktural meningkatkan kesejahteraan ekonomi regional.

#### **4.5.5. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral)**

Berdasarkan hasil regresi, Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa UMP berpengaruh terhadap kinerja ekonomi sektoral tidak dapat diterima secara statistik. Koefisien negatif menunjukkan bahwa kenaikan UMP cenderung meningkatkan biaya tenaga kerja yang ditanggung oleh sektor usaha, sehingga berpotensi menekan tingkat produksi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tingkat regional.

Dalam teori ekonomi tenaga kerja, kenaikan upah minimum memiliki dua sisi dampak. Di satu sisi, peningkatan upah dapat mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan permintaan agregat. Namun di sisi lain, kenaikan upah juga meningkatkan biaya produksi bagi sektor usaha, terutama pada sektor padat karya dengan tingkat produktivitas yang relatif terbatas (Widarjono, 2018). Dalam konteks kinerja ekonomi sektoral, peningkatan biaya tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas dapat mengurangi margin usaha dan menahan ekspansi output, sehingga berdampak negatif terhadap PDRB sektor usaha.

Meskipun demikian, karena pengaruhnya tidak signifikan secara statistik, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan UMP antarprovinsi selama periode penelitian belum memberikan dampak yang cukup kuat terhadap dinamika output sektoral. Hal ini dapat mengindikasikan adanya mekanisme penyesuaian di tingkat sektor usaha, seperti peningkatan efisiensi, substitusi faktor produksi, atau penyesuaian struktur biaya, sehingga kenaikan UMP tidak secara langsung menghambat kinerja ekonomi sektoral dalam jangka pendek.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh literasi digital, literasi ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap PDRB sektor usaha (kinerja ekonomi sektoral), yaitu sebagai berikut:

1. Literasi digital tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat belum secara langsung mampu mendorong peningkatan output dan nilai tambah sektoral. Meskipun transformasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, dan mempercepat integrasi ekonomi antarwilayah, pemanfaatan teknologi digital antarprovinsi masih belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kinerja ekonomi sektoral secara nyata selama periode penelitian.
2. Literasi ekonomi yang diprosikan melalui penyaluran kredit atau pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral provinsi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan intermediasi keuangan selama periode penelitian belum sepenuhnya diiringi dengan efektivitas alokasi pembiayaan pada sektor-sektor produktif. Kredit yang tidak tersalurkan secara optimal atau lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non-produktif berpotensi menekan pertumbuhan output sektoral. Oleh karena itu, peningkatan akses pembiayaan perlu diimbangi dengan kualitas penyaluran kredit yang tepat sasaran serta penguatan sektor produktif agar mampu mendorong peningkatan nilai tambah regional.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia

belum secara langsung berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi sektoral dalam jangka pendek. Meskipun IPM mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pengaruhnya terhadap output sektoral kemungkinan memerlukan waktu (*time lag*) serta dukungan kebijakan struktural dan investasi sektor riil agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terkonversi menjadi pertumbuhan nilai tambah ekonomi.

4. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor usaha. Hasil ini menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian dalam perekonomian daerah, di mana peningkatan pengangguran pada sektor formal mendorong pergeseran tenaga kerja ke sektor usaha yang lebih fleksibel dan mampu menyerap tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat meningkatkan aktivitas produksi pada sektor tertentu sehingga mendorong kenaikan output yang tercermin dalam PDRB sektoral. Dengan demikian, sektor usaha berperan sebagai sektor penyangga dalam menjaga dinamika ekonomi regional ketika pasar tenaga kerja formal mengalami tekanan.
5. Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak signifikan terhadap PDRB sektor usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan UMP cenderung meningkatkan biaya tenaga kerja pada sektor usaha, yang berpotensi menekan tingkat produksi dan nilai tambah. Namun demikian, karena pengaruhnya tidak signifikan secara statistik, perubahan UMP antarprovinsi selama periode penelitian belum memberikan dampak yang cukup kuat terhadap kinerja ekonomi sektoral. Hal ini mengindikasikan adanya kemampuan penyesuaian dalam struktur biaya dan produktivitas sektor usaha sehingga kenaikan upah minimum tidak secara langsung menghambat pertumbuhan output sektoral dalam jangka pendek.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi ekonomi yang diprosikan melalui penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor usaha. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses pembiayaan belum sepenuhnya diikuti dengan pemanfaatan yang produktif dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemerintah bersama lembaga keuangan perlu memastikan bahwa intermediasi keuangan berjalan secara lebih efektif dan tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan nilai tambah regional. Penyaluran pembiayaan perlu diiringi dengan penguatan pengawasan kualitas kredit, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas manajerial pelaku usaha, sehingga dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan output sektoral. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal cenderung beralih ke aktivitas usaha mandiri atau sektor informal yang turut berkontribusi pada aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kebijakan pengembangan kewirausahaan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, sehingga peralihan tenaga kerja tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat kontribusi sektor usaha terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan literatur dalam kajian mengenai kinerja ekonomi sektoral, literasi digital, intermediasi keuangan, pembangunan manusia, serta faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhinya pada level regional. Akademisi diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan dengan pendekatan teoritis dan metodologis yang lebih beragam, serta memperdalam

analisis mengenai efektivitas kebijakan ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan PDRB sektoral.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi PDRB sektor usaha sebagai indikator kinerja ekonomi sektoral, seperti tingkat kemiskinan, inflasi, investasi daerah, kualitas infrastruktur, serta belanja pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang untuk menangkap efek jangka panjang (*long-run effect*) atau mengkaji analisis spasial antarprovinsi guna melihat adanya efek keterkaitan wilayah (*spillover effect*). Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih kompleks, seperti model panel dinamis atau pendekatan spasial ekonometrika, disarankan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dalam menjelaskan determinan kinerja ekonomi sektoral di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bawden, D. 2001. "Information and Digital Literacies: A Review of Concepts" in *Journal of Documentation*, 57(2), 218-259.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 7(2), 107–128. [https://doi.org/10.1016/S1057-0810\(99\)80006-7](https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7)
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Kinerja Kewirausahaan: Literasi Ekonomi, Literasi Digital dan Peran Mediasi Inovasi. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(5), 745–762. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i5.1288>
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. New York: Wiley.
- Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296–316. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x>
- Japelli, T. (2010). *Economic Literacy: An International Comparison*. *The Economic Journal*. Vol.120 No.238, 429-451
- Jannah, R., Naeruz, M., & Amrani. (2025). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 5144–5149.
- Lokiman, A., Engka, D. S. M., & Sumual, J. I. (2013). Pengaruh upah minimum provinsi dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja serta dampaknya pada PDRB Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 13(3), 1–15.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Maryatmo, R., & Pamenta, D. V. (2023). Peran Aplikasi Digital Pada Kinerja Bisnis Kedai Kopi Skala Mikro di Diy. *Modus*, 35(1), 101–115. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6967>
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ningsih, S., & Dukalang, H. H. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1), 43-53.
- Nuraeni. (2015). *Pengaruh Literasi Ekonomi, Kelompok Teman Sebaya dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Untuk Produk Fashion pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Nurhayati, A. (2020). Implementasi Jiwa Wirausaha Dan Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswi Purwakarta. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 87–94. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i2.141>
- Paramita, A. (2021). Tingkat Serapan Tenaga Kerja Sektor Umkm Di Era Ekonomi Digital Sekaligus Pada Masa Pandemi Covid-19. *Bata Ihyas Educational Management Review*, 1(2), 1–7. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/biemr/article/view/110>
- Rahmadan, R., Ridwan, E., & Digital, E. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 the Influence of the Covid-19 Pandemic Against the Impact of. *MENARA Ilmu*, XV(01), 84–96.
- Rosifa, E., Tomy, D., & Chayono, D. (2024). Pengaruh Literasi Digital, Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan dalam menghadapi Era Revolusi Industri 5.0 di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. *Usc*, 2(1), 103–112. <https://conference.uts.ac.id/index.php/Student>
- Sahroh, A. F. (2018). Pengaruh Literasi Ekonomi Dan Tingkat Penggunaan Media Sosial Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi Di Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 6(3), 208–215.
- Salsabila, F. (2009). Pengaruh Literasi Ekonomi dan Literasi Digital terhadap Perilaku Berwirausaha Sektor Kuliner yang Terdaftar Pada Aplikasi Go Food di Pasar Segar Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Dan. Kewirausahaan*, 10(2), 93–104.
- Saputri, S. A., Berliana, I., & Nasrida, M. F. (2023). Peran Marketplace Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Indonesia. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 69–75. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i1.2199>

- Sari, L. T. A., & Fisabilillah, L. W. P. (2023). Pengaruh pertumbuhan UMKM dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 178–190.
- Sasmito, Y. W. D., & Prestianto, B. (2021). Analisis Tingkat Literasi Digital Dan Penerapan E-Commerce Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 4(1), 145. <https://doi.org/10.24167/jemap.v4i1.3148>
- Sina., Garlans., Peter. (2012) Analisis Literasi Ekonomi. *Jurnal Economia*. Vol.8 No.2, 135-143
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Ulyati, M., Palupi, R. I., Fauzan, M. N., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 1(3), 59–74. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i3.214>
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. Mikro Usaha Kecil dan Menengah. UMKM Sumbawa, 18 Agustus 2025. <https://umkm.sumbawakab.go.id> 2023. Produk UMKM di Sumbawa.
- UNESCO. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265403>
- Wheeler, S. (2012). Digital literacies for engagement in emerging online cultures. eLC Research Paper Series, 5, 14-2
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya disertai panduan EVIEWS* (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### Lampiran I. Data Penelitian

No	Provinsi	Tahun	ID	PDRB sektor usaha	IMDI Digital	Literasi Ekonomi (Milyar)	IPM	TPT	UMP
1	Aceh	2022	1	140971.72	53.93	34,232	72.8	6.17	3,166,460
2	Aceh	2023	1	146932.42	44.60	38,567	73.4	6.03	3,413,666
3	Aceh	2024	1	153780.44	60.61	44,486	74.03	5.75	3,460,672
5	Sumatera Utara	2022	2	573528.77	47.6433	222,900	72.71	6.16	2,522,610
6	Sumatera Utara	2023	2	602235.95	44.27	250,210	73.37	5.89	2,710,494
7	Sumatera Utara	2024	2	632534.73	55.06	280,974	74.02	5.6	2,809,915
9	Sumatera Barat	2022	3	182628.34	56.92998	63,336	73.26	6.28	2,512,539
10	Sumatera Barat	2023	3	191070.55	46.06	67,730	73.75	5.94	2,742,476
11	Sumatera Barat	2024	3	199407.38	59.86	71,068	74.49	5.75	2,811,449
13	Riau	2022	4	529532.98	42.0847	84,935	73.52	4.37	2,938,564
14	Riau	2023	4	551828.49	43.80	91,971	74.04	4.23	3,191,663
15	Riau	2024	4	571233.59	61.01	101,960	74.79	3.7	3,294,625
17	Jambi	2022	5	161731.95	42.6	47,270	72.14	4.59	2,698,941
18	Jambi	2023	5	169277.62	42.78	50,203	72.77	4.53	2,943,033
19	Jambi	2024	5	176906.5	60.13	54,898	73.43	4.48	3,037,121
21	Sumatera Selatan	2022	6	343503.62	39.542	94,767	70.9	4.63	3,144,446
22	Sumatera Selatan	2023	6	360967.45	42.05	103,050	71.62	4.11	3,404,177
23	Sumatera Selatan	2024	6	379119.63	51.15	117,947	72.3	3.86	3,456,874
25	Bengkulu	2022	7	49916.06	57.06	26,191	72.16	3.59	2,238,094
26	Bengkulu	2023	7	52051.56	45.21	27,804	71.15	3.42	2,418,280
27	Bengkulu	2024	7	54454.65	61.13	29,997	73.39	3.11	2,507,079
29	Lampung	2022	8	257534.19	48.51	60,667	70.45	4.52	2,440,486
30	Lampung	2023	8	269240.54	44.08	60,479	71.15	4.23	2,633,285
31	Lampung	2024	8	281557.2	57.48	64,978	71.81	4.19	2,716,497

33	Kep. Bangka Belitung	2022	9	57804.21	53.1	14,474	72.24	4.77	3,264,884
34	Kep. Bangka Belitung	2023	9	60336.51	45.09	16,162	72.85	4.56	3,498,479
35	Kep. Bangka Belitung	2024	9	60802.64	63.12	17,792	73.33	4.63	3,640,000
37	Kep. Riau	2022	10	190111.09	52.79	45,724	76.46	8.23	3,050,172
38	Kep. Riau	2023	10	199912.83	44.65	49,441	77.11	6.8	3,279,194
39	Kep. Riau	2024	10	209939.07	61.25	55,641	77.97	6.39	3,402,492
41	DKI Jakarta	2022	11	1953488.99	57.86	3,129,491	81.65	7.18	4,641,854
42	DKI Jakarta	2023	11	2050472.97	0	3,540,977	82.46	6.53	4,901,798
43	DKI Jakarta	2024	11	2151041.33	62.77	4,027,858	83.08	6.21	5,067,381
45	Jawa Barat	2022	12	1589984.93	50.11	543,165	73.12	8.31	1,841,487
46	Jawa Barat	2023	12	1669421.49	44.99	577,246	73.74	7.44	1,986,670
47	Jawa Barat	2024	12	1752071.2	60.28	625,208	74.43	6.75	2,057,495
49	Jawa Tengah	2022	13	1050278.09	60.29	351,350	72.79	5.57	1,812,935
50	Jawa Tengah	2023	13	1102473.58	47.20	373,724	73.39	5.13	1,958,170
51	Jawa Tengah	2024	13	1157025.94	61.47	387,080	73.88	4.78	2,036,947
53	DI Yogyakarta	2022	14	112901.32	57.56	47,355	80.64	4.06	1,840,916
54	DI Yogyakarta	2023	14	118625.54	47.17	51,386	81.07	3.69	1,981,782
55	DI Yogyakarta	2024	14	124590.45	56.88	55,679	81.55	3.48	2,125,898
57	Jawa Timur	2022	15	1757874.9	46.81	520,569	72.75	5.49	1,891,567
58	Jawa Timur	2023	15	1844808.68	45.59	551,129	73.38	4.88	2,040,244
59	Jawa Timur	2024	15	1935810.15	58.36	589,907	74.09	4.19	2,165,244
61	Banten	2022	16	484129.42	60.58	182,240	73.32	8.09	2,501,203
62	Banten	2023	16	507425.74	44.30	195,873	77.1	7.52	2,661,280
63	Banten	2024	16	531735.25	57.02	211,274	74.48	6.68	2,727,812
65	Bali	2022	17	150830.77	69.11	86,821	76.44	4.8	2,516,971
66	Bali	2023	17	159447.66	45.60	92,265	77.1	2.69	2,713,672
67	Bali	2024	17	168186.03	65.56	100,662	77.76	1.79	2,813,672
69	Nusa Tenggara Barat	2022	18	102073.66	58.42	54,265	69.46	2.89	2,207,212
70	Nusa Tenggara Barat	2023	18	103906.22	45.03	62,733	70.2	2.8	2,371,407

71	Nusa Tenggara Barat	2024	18	109414.97	61.7	71,129	70.93	2.73	2,444,067
73	Nusa Tenggara Timur	2022	19	72711.28	42.72	39,766	65.9	3.54	1,975,000
74	Nusa Tenggara Timur	2023	19	75234.57	39.34	44,236	69.41	3.14	2,123,994
75	Nusa Tenggara Timur	2024	19	78044.57	59.48	45,230	67.39	3.02	2,186,826
77	Kalimantan Barat	2022	20	148368.94	51.45	64,787	68.63	5.11	2,434,328
78	Kalimantan Barat	2023	20	154980.81	39.21	71,395	69.41	5.05	2,608,602
79	Kalimantan Barat	2024	20	162574.47	58.52	75,702	70.13	4.86	2,702,616
81	Kalimantan Tengah	2022	21	109094.72	49.89	42,588	71.63	4.26	2,922,516
82	Kalimantan Tengah	2023	21	113611.53	41.52	47,034	72.2	4.1	3,181,013
83	Kalimantan Tengah	2024	21	118682.32	54.3	50,674	72.73	4.01	3,261,616
85	Kalimantan Selatan	2022	22	142339.22	49.39	56,904	71.84	4.74	2,906,473
86	Kalimantan Selatan	2023	22	149226.1	42.78	64,693	72.5	4.31	3,149,978
87	Kalimantan Selatan	2024	22	156756.94	58.65	78,517	73.03	4.2	3,282,812
89	Kalimantan Timur	2022	23	506158.91	63.96	88,372	77.44	5.71	3,014,497
90	Kalimantan Timur	2023	23	537630.01	43.40	100,731	78.2	5.31	3,201,396
91	Kalimantan Timur	2024	23	570824.01	58.82	109,528	78.83	5.14	3,360,858
93	Kalimantan Utara	2022	24	66528.39	42.39	-	71.83	4.33	3,016,738
94	Kalimantan Utara	2023	24	69816.76	40.56	-	72.49	4.01	3,251,703
95	Kalimantan Utara	2024	24	73007.99	53.52	-	73.02	3.9	3,361,653
97	Sulawesi Utara	2022	25	96768.15	43.29	44,068	73.81	6.61	3,310,723
98	Sulawesi Utara	2023	25	102070.48	42.06	48,841	74.36	6.1	3,485,000
99	Sulawesi Utara	2024	25	107575.01	58.08	52,163	75.03	5.85	3,545,000
101	Sulawesi Tengah	2022	26	172624.82	50.13559	45,256	70.28	3	2,390,739
102	Sulawesi Tengah	2023	26	193181.36	43.65	48,260	70.95	2.95	2,599,546
103	Sulawesi Tengah	2024	26	212281.54	61.12	56,776	71.56	2.94	2,736,698
105	Sulawesi Selatan	2022	27	360912.82	38.13814	136,667	72.82	4.51	3,165,876
106	Sulawesi Selatan	2023	27	377207.78	41.57	154,690	73.46	4.33	3,385,145
107	Sulawesi Selatan	2024	27	396141.74	57.1	162,523	74.05	4.19	3,434,298
109	Sulawesi Tenggara	2022	28	102656.43	44.74726	36,140	72.23	3.36	2,576,017

110	Sulawesi Tenggara	2023	28	108152.98	44.31	35,787	72.79	3.15	2,758,985
111	Sulawesi Tenggara	2024	28	113989.49	60.14	40,494	73.48	3.09	2,885,964
113	Gorontalo	2022	29	30282.21	55.43	17,036	69.81	2.58	2,800,580
114	Gorontalo	2023	29	31643.79	41.46	17,545	70.45	3.06	2,989,350
115	Gorontalo	2024	29	32949.62	62.54	17,553	71.23	3.13	3,025,100
117	Sulawesi Barat	2022	30	33643.02	38.11749	10,894	66.92	2.34	2,678,863
118	Sulawesi Barat	2023	30	35402.56	42.07	11,897	67.55	2.27	2,871,795
119	Sulawesi Barat	2024	30	37088.07	57.58	12,496	68.2	2.68	2,914,958
121	Maluku	2022	31	33575.07	41.97	14,808	70.22	6.88	2,619,313
122	Maluku	2023	31	35322.9	42.89	16,110	70.94	6.31	2,812,828
123	Maluku	2024	31	37209.36	62.21	17,274	71.57	6.11	2,949,953
125	Maluku Utara	2022	32	40248.38	18.19	14,042	69.47	3.98	2,862,231
126	Maluku Utara	2023	32	48494.74	44.07	14,863	70.21	4.31	2,976,720
127	Maluku Utara	2024	32	55152.33	52.99	15,965	71.03	4.03	3,200,000
129	Papua Barat	2022	33	62530.53	48.71	-	65.16	5.37	3,200,000
130	Papua Barat	2023	33	64975.02	40.65	-	66.16	5.38	3,282,000
131	Papua Barat	2024	33	49486.23	55.35	-	67.02	4.13	3,393,000
133	Papua Barat Daya	2022	34	0	0	-	67.59	-	
134	Papua Barat Daya	2023	34	0	42.42	-	68.05	-	
135	Papua Barat Daya	2024	34	24873.72	57.49	-	68.63	6.48	4,024,270
137	Papua	2022	35	172907.29	44.62	34,763	71.76	2.83	3,561,932
138	Papua	2023	35	181926.55	40.65	38,776	72.41	2.67	3,864,696
139	Papua	2024	35	51587.16	56.48	41,161	73	6.48	4,024,270
141	Papua Selatan	2022	36	0	0	-	65.74	-	
142	Papua Selatan	2023	36	0	37.09	-	67.27	-	
143	Papua Selatan	2024	36	18963.85	55.89	-	67.9	4.05	4,024,270
145	Papua Tengah	2022	37	0	0	-	58.25	-	
146	Papua Tengah	2023	37	0	39.09	-	58.93	-	
147	Papua Tengah	2024	37	105471.48	52.75	-	59.75	2.75	4,024,270

149	Papua Pegunungan	2022	38	0	0	-	51.7	-	
150	Papua Pegunungan	2023	38	0	38.44	-	52.45	-	
151	Papua Pegunungan	2024	38	13798.74	45.83	-	53.42	1.32	4,024,270

## Lampiran II. Hasil Uji Chow Test

Fixed-effects (within) regression  
 Group variable: id

Number of obs = 152  
 Number of groups = 38

R-squared:  
 Within = 0.4455  
 Between = 0.4632  
 Overall = 0.1772

Obs per group:  
 min = 4  
 avg = 4.0  
 max = 4

corr(u\_i, Xb) = -0.9046

F(5,109) = 17.52  
 Prob > F = 0.0000

y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
x1	596.3863	2063.876	0.29	0.773	-3494.149	4686.921
x2	-.9576049	.2920907	-3.28	0.001	-1.536519	-.3786906
x3	2226.09	1625.167	1.37	0.174	-994.9386	5447.119
x4	70301.8	23696.89	2.97	0.004	23335.34	117268.3
x5	-.0543854	.0386062	-1.41	0.162	-.1309016	.0221307
_cons	161579.1	115280.7	1.40	0.164	-66903.52	390061.7
sigma_u	867439.15					
sigma_e	228105.44					
rho	.9353223	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u\_i=0: F(37, 109) = 4.25 Prob > F = 0.0000

## Lampiran III. Hasil Uji Hausman Test

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
	(b) fe_model	(B) re_model		
x1	596.3863	-52.38244	648.7687	750.2803
x2	-.9576049	.3709492	-1.328554	.2862573
x3	2226.09	2228.509	-2.418894	646.3219
x4	70301.8	98809.18	-28507.38	13733.09
x5	-.0543854	-.0877497	.0333642	.0181477

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg.  
 B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

chi2(3) = (b-B)'[(V\_b-V\_B)^(-1)](b-B)  
 = 14.35  
 Prob > chi2 = 0.0025

### Lampiran IV. Hasil Uji Fixed Effect Model

```

Fixed-effects (within) regression          Number of obs   =       152
Group variable: id                       Number of groups =       38

R-squared:                               Obs per group:
  Within = 0.4455                         min =          4
  Between = 0.4632                        avg =         4.0
  Overall = 0.1772                        max =          4

corr(u_i, Xb) = -0.9046                   F(5,109)       =       17.52
                                           Prob > F       =       0.0000

```

y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
x1	596.3863	2063.876	0.29	0.773	-3494.149	4686.921
x2	-.9576049	.2920907	-3.28	0.001	-1.536519	-.3786906
x3	2226.09	1625.167	1.37	0.174	-994.9386	5447.119
x4	70301.8	23696.89	2.97	0.004	23335.34	117268.3
x5	-.0543854	.0386062	-1.41	0.162	-.1309016	.0221307
_cons	161579.1	115280.7	1.40	0.164	-66903.52	390061.7
sigma_u	867439.15					
sigma_e	228105.44					
rho	.9353223	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all  $u_i=0$ :  $F(37, 109) = 4.25$  Prob > F = 0.0000

## Lampiran V. Statistika Deskriptif

```
. summarize pdrb imdi le ipm tpt ump
```

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
pdrb	152	245694.5	456663.7	0	2151041
imdi	152	48.375	11.79225	0	69
le	152	188728.1	600155.3	0	4136648
ipm	152	53.77632	31.4742	0	83
tpt	152	3.236842	2.472998	0	8
ump	152	2046037	1450934	0	5067381